

**ANALISIS KEMISKINAN DI KABUPATEN BATU BARA
PASCA KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**



Oleh :

Nama : Muhammad Firman Maulana

NPM : 1905180053

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

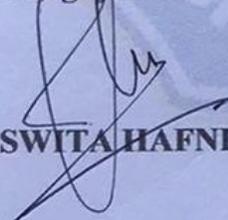
MEMUTUSKAN

Nama : M. FIRMAN MAULANA
NPM : 1905180053
Jurusan : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : ANALISIS KEMISKINAN DI KABUPATEN BATUBARA PASCA KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL.

Dinyatakan : (B+) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

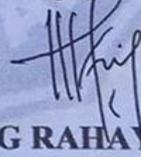
Tim Penguji

Penguji I



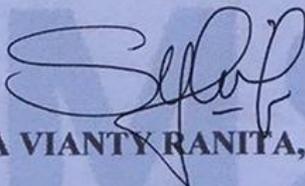
(Dra. Hj. ROSWITA HAFNI, M.Si.)

Penguji II



(SRI ENDANG RAHAYU, SE, M.Si.)

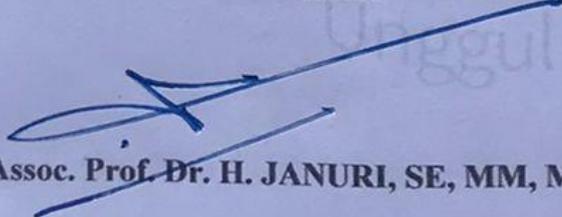
Pembimbing



(Dr. SYLVIA VIANTY RANITA, S.E., M.Si.)

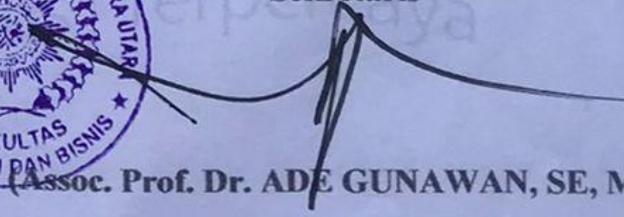
Panitia Ujian

Ketua



(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, SE, MM, M.Si, CMA)

Sekretaris



(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, SE, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : M. FIRMAN MAULANA

N.P.M : 1905180053

Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN

Alamat Rumah : JL. KARYA PERBANTASAN GG. IMAM

Judul Skripsi : ANALISIS KEMISKINAN DI KABUPATEN BATU BARA
PASCA KEBIJAKAN DESENTRALIASI FISKAL

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, 25 Agustus 2023

Pembimbing Skripsi

(Dr. SYLVIA VIANTY RANITA S.E. M.Si)

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan

(Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si)



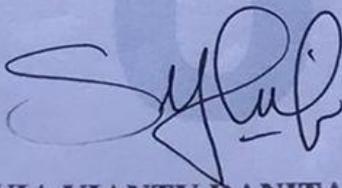
(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, SE, MM, M.Si)

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : M. Firman Maulana
N.P.M : 1905180053
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Alamat Rumah : Jl. Karya Perbatasan Gg. Imam
Judul Skripsi : Analisis Kemiskinan di Kabupaten Batu Bara Pasca Kebijakan Desentralisasi Fiskal

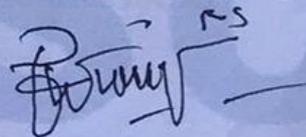
Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
11/8-2023	Bab IV : Data & Pengolahannya		
15/8-2023	Bab III & IV penulisan & sistematikanya		
18/8-2023	Bab IV Hasil olah data terkait uji Asumsi klasik		
23/8-2023	Bab IV & V Interpretasi hasil olah data dan pembahasannya		
25/8-2023	ACC sidang skripsi		

Pembimbing Skripsi



Dr. SYLVIA VIANTY RANITA, S.E., M.Si.

Medan, Agustus 2023
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan



Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E., M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **M. FIRMAN MAULANA**

NPM : 1905180053

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Konsentrasi : Analisa Keuangan dan Perbankan

Dengan ini menyatakan bawah skripsi saya yang berjudul “Analisis Kemiskinan di Kabupaten Batu Bara Pasca Kebijakan Desentralisasi Fiskal” adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



M. FIRMAN MAULANA

ABSTARK

ANALISIS KEMISKINAN DI KABUPATEN BATU BARA PASCA KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL

M. Firman Maulana

Program Studi ekonomi Pembangunan

E-mail: firmanmuhammad088@gmail.com

Indonesia adalah salah satu negara berkembang dihadapkan pada masalah kemiskinan yang tidak bisa diabaikan. Angka kemiskinan masyarakat setiap tahunnya seolah tak pernah berkurang. Kemiskinan di Kabupaten Batu Bara periode 2017 sampai 2022 trus mengalami fluktuasi. Ini di karenakan adanya virus covid 19 yang melanda dunia sehingga kegiatan bersosial dibatasi sehingga membuat masyarakat tidak bebas bergerak. Namun setelah usai covid 19 kemiskinan di Kabupaten Batu Bara mengalami penurunan, ini pertanda adanya perkembangan yang baik dari angka Kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seberapa besar Kemiskinan di Kabupaten Batu Bara pasca kebijakan Desentralisasi Fiskal. Variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Desa (DD), Produk Doemstik Regional Bruto perkapita (PDRBKAP), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Yang digunakan data mulai dari Tahun 2017 Sampai 2022. Dengan analisis data kuantitatif metode regresi berganda dengan mengambil data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementrian Keuangan (KEMENKEU). Dari Hasil Penelitian di tunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Produk Domestik Regional Bruto Perkapita (PDRBKAP) berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Batu Bara Pasca Kebijakan Desentralisasi Fiskal.

Kata Kunci : Kemiskinan, PDRBperkapita, TPAK, DAU, DAK

ABSTRACT

ANALISIS KEMISKINAN DI KABUPATEN BATU BARA PASCA KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL

M Firman Maulana

Program studi Ekonomi Pembangunan

Email: firmanmuhammad088@gmail.com

Indonesia is one of the developing countries faced with the problem of poverty which cannot be ignored. The poverty rate of the people every year seems to have never decreased. Poverty in Batu Bara Regency from 2017 to 2022 continues to fluctuate. This is due to the Covid 19 virus that hit the world so that social activities are limited so that people are not free to move. However, after Covid 19 poverty in Batu Bara Regency has decreased, this is a sign that there is good development of the poverty rate. This study aims to examine how much Poverty is in Batu Bara District after the Fiscal Decentralization policy. The variables used in this study are General Allocation Funds (DAU), Special Allocation Funds (DAK), Revenue Sharing Funds (DBH), Village Funds (DD), Gross Regional Domestic Product per capita (PDRBKAP), and Labor Force Participation Rate (TPAK).). The data used is from 2017 to 2022. With quantitative data analysis the multiple regression method takes data from the Central Statistics Agency (BPS) and the Ministry of Finance (KEMENKEU). From the results of the study it was shown that the General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK) and Per Capita Gross Regional Domestic Product (PDRBKAP) had a significant effect on Poverty in Batu Bara District after the Fiscal Decentralization Policy.

Keywords: Poverty, PDRB capita, TPAK, DAU, DAK

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil'alamiin. Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul **Analisis Kemiskinan Di Kabupaten Batu Bara Pasca Kebijakan Desentralisasi Fisikal**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabat dan seluruh pengikut Beliau yang insya Allah tetap istiqomah hingga akhir zaman kelak, Amin. Dengan selesainya penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Adapun ungkapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Rezeki-Nya yang luar biasa serta nikmat iman dan nikmat Kesehatan kepada saya. Dan atas izinnya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan cintai, yang selalu menjadi orang hebat dan kuat selama hidup saya, yang memberikan semangat dan dukungan kepada saya dalam menghadapi segala proses yang saya jalani dan membuat saya kuat dalam menghadapi segala situasi.
3. Bapak Dr. H. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak H. Januri S.E., M.M., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
5. Ibu Dr Prawidya Hariani RS, Selaku Ketua Jurusan dan Dosen Pembimbing Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Roswita Hafni M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dr. Sylvia Vianty Ranita S.E. M.Si. selaku dosen pembimbing saya yang telah banyak memberi arahan kepada saya tentang menulis skripsi ini.
8. Seluruh Dosen mata kuliah Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Prodi Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan ilmunya yang bermanfaat, semoga menjadi amalan di akhirat kelak.
9. Bapak / Ibu Biro Fakultas Ekonomi yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam Akademik .
10. Kepada adik dan kakak saya yang selalu memberi semangat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman seperjuangan saya serta rekan sekelas masa perkuliahan, dan teman-teman dekat saya yang telah memberi informasi mengenai perkuliahan, dan memberi semangat kepada saya.
12. Kepada teman dekat saya Lioni yang telah memberikan semangat, doa, dukungan dan yang setia menemani saya ketika menulis skripsi ini.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	11
1.3. Batasan Masalah.....	12
1.4. Rumusan Masalah	12
1.5. Tujuan Penelitian	12
1.6. Manfaat Penelitian	13
1.6.1. Manfaat Akademik.....	13
1.6.2. Manfaat Nonakademik.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1. Landasan Teori	14
2.1.1. Kebijakan Fiskal	14
2.1.2. Kebijakan Pengeluaran Pemerintah	19
2.1.3. Kemiskinan	21
2.1.4. Produk Domestik Regional Brito (PDRB).....	30
2.1.5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).....	35
2.2. Penelitian Terdahulu	38
2.3. Regulasi.....	39
2.3.1. Desentralisasi Fiskal	39
2.3.2. Dana Desa.....	40
2.3.3. Kebijakan Dana Desa.....	41
2.4. Kerangka Penelitian	42
2.4.1. Tahap Penelitian.....	42

2.4.2. Kerangka Analisis	42
2.4.3. Kerangka Konseptual Analisis	43
2.5. Hipotesis.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1 Pendekatan Penelitian	44
3.2 Defenisi Operasional.....	44
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....	45
3.4 Teknik Pengumpulan Data	46
3.5 Teknik Analisis Data	46
3.5.1 Analisi Ekonomi Secara Deskriptif.....	46
3.5.2 Analisis Model Ekonometrika.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN	55
4.1 Gambaran Umum.....	55
4.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Batu Bara.....	55
4.1.2 Kondisi Demografi Kabupaten Batu Bara	56
4.1.3 Kondisi Ekonomi	59
4.1.4 Kondisi Sosial	67
4.2 Analisi Pembahasan Tujuan.....	73
4.2.1. Melakukan analisi ekonomi secara deskriptif tentang perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Batu Bara	73
4.2.2 Uji Asumsi Klasik	77
4.2.3 Hasil Regresi Berganda.....	82
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	90
5.1 Kesimpulan	91
5.2 Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Persentase Kemiskinan Indonesia dari Maret 2012 sampai September 2022	2
Gambar 1.2 Persentase tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Batu bara	5
Gambar 2.1 Lingkaran Kemiskinan	24
Gambar 2.2 Kerangka analisis	42
Gambar 2.3 Kerangka konseptual	43
Gambar 4.1 Penduduk Usia kerja dan Tenaga Kerja Kabupaten Batu Bara Tahun 2019 sampai 2022	58
Gambar 4.2 Struktur PDRB beberapa lapangan usaha	63
Gambar 4.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batu Bara Tahun 2018 sampai 2022	64
Gambar 4.4 Perkembangan Gini Ratio September 2016-september 2022	66
Gambar 4.5 Perkembangan IPM Kabupaten Batu Bara.....	68
Gambar 4.6 Perkembangan Angka Harapan Hidup Batu Bara, 2018-2022.....	69
Gambar 4.7 Perkembangan HLS dan RLS Kabupaten Batu Bara, 2018-2022.....	70
Gambar 4.8 Perkembangan Pengeluaran per kapita Kabupaten Batu Bara Tahun 2018 sampai 2022	72
Gambar 4.9 Perkembangan Kemsikinan di Kabupaten Batu Bara	74
Gambar 4.10 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan.....	77
Gambar 4.11 Uji Multikolinearitas	76
Gambar 4.12 Uji Multikolinearitas sesudah menghilangkan 1 variabel	78
Gambar 4.13 Uji Normalitas	78
Gambar 4.14 Uji Heteroskedastisitas	79
Gambar 4.15 Uji Autokorelasi	80
Gambar 4.16 Uji Autokorelasi setelah di hilangkan 1 variabel	81
Gambar 4.17 Regresi Berganda	82
Gambar 4.18 Kurva Distribusi Normal Uji t Variabel DAU.....	84
Gambar 4.19 Kurva Distribusi Normal Uji t Variabel DAK.....	87
Gambar 4.20 Kurva Distribusi Normal Uji t Variabel DBH.....	87

Gambar 4.21 Kurva Distribusi Uji F Pada Model Regresi89

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan kemiskinan Kabupaten Batu bara	8
Tabel 1.2 Harga Konstan Kabupaten Batu bara	10
Tabel 1.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Batu bara	11
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	38
Tabel 3.1 Definisi Operasional.....	45
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kabupaten Batu Bara	56
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Batu Bara Tahun 2020.....	57
Tabel 4.3 PDRB Kabupaten Batu Bara ADHB (juta/milyar) Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022	59
Tabel 4.4 PDRB Kabupaten Batu Bara ADHK (juta/milyar) 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2018- 2022.....	60
Tabel 4.5 Sumber Pertumbuhan PDRB (persen) Kabupaten Batu Bara Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022	61
Tabel 4.6 PDRB dan PDRB Perkapita Kabupaten Batu Bara Tahun 2018 — 2022..	62
Tabel 4.7 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Kabupaten Batu Bara Menurut Lapangan Usaha (persen).....	65
Tabel 4.8 Jumlah Pengangguran dan Tingkat Peangguran Terbuka Berumur 15 Tahun ke Atas dari Tahun 2020 sampai 2022	67
Tabel 4.9 Angka Kemiskinan Kabupaten Batu Bara.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

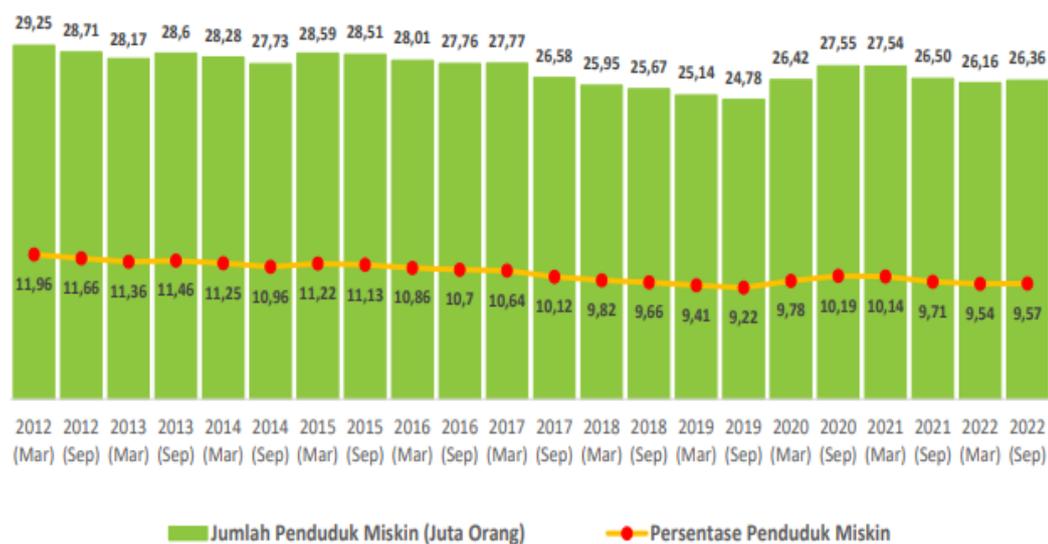
1.1. Latar Belakang

Tujuan dari didirikannya sebuah negara pada umumnya adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat atau penduduknya. Namun demikian dalam perjalanannya pemerintah akan dibayangi oleh permasalahan dasar dalam menciptakan kesejahteraan penduduknya yaitu kemiskinan. Demikian juga dengan yang terjadi di Indonesia, masalah kemiskinan masih menjadi topik yang penting untuk diteliti. Hal ini tak lepas dari masih relatif besarnya angka kemiskinan yang ada di Indonesia sebagai negara berkembang. Kemiskinan menjadi masalah yang penting saat ini di Indonesia, sehingga menjadi suatu fokus perhatian bagi pemerintah Indonesia. Sudah lebih dari setengah abad Indonesia dalam kemiskinan. Dibandingkan dengan negara lain, Indonesia masih jauh dari harapan kemakmuran dan kesejahteraan. Dibandingkan dengan negara tetangga Singapura, dahulunya pada awal kemerdekaannya tahun 1965 Singapura memiliki masalah yang kompleks. Namun pada masa sekarang ini Singapura menjadi negara dengan pendapatan per kapita tertinggi ketiga di dunia. Berbeda dengan Indonesia, setelah berjalannya waktu perekonomian Indonesia masih berada pada negara berkembang.

Kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan biaya yang harus di keluarkan untuk melakukan pembangunan ekonomi menjadi lebih besar sehingga secara tidak langsung akan menghambat pertumbuhan ekonomi, sehingga pertumbuhan haruslah beriringan dan terencana mengupayakan terciptanya pemerataan kesempatan dan pembagian hasil-hasil pembangunan. Persoalan kemiskinan

menjadi menjadi salah satu target kebijakan pembangunan di setiap Negara. Pengentasan kemiskinan telah menjadi tujuan pembangunan yang fundamental dan menjadi sebuah alat ukur untuk menilai efektivitas pelaksanaan berbagai jenis program pembangunan.

Khusus untuk kasus Indonesia sendiri, merujuk pada undang-undang dasar tahun 1945 pasal 34, menegaskan bahwa pemerintah merupakan institusi atau lembaga yang paling bertanggung jawab terkait dengan permasalahan kemiskinan tersebut. Pemerintah sesuai undang-undang dasar tahun 1945 adalah pemerintah dari tingkat tertinggi yaitu pemerintah pusat, pemerintah tingkat provinsi, hingga pada level pemerintah paling rendah yaitu daerah tingkat kabupaten/kota otonomi daerah atau sering disebut desentralisasi fiskal, mengharuskan pemerintah daerah dan masyarakat bersama-sama membangun daerahnya sendiri.



sumber: BPS Indonesia (www.bps.go.id)

Gambar 1.1 Persentase Kemiskinan Indonesia Indonesia dari Maret 2012 sampai September 2022

Secara umum, pada periode Maret 2012–September 2022, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun

persentase, perkecualian pada September 2013, Maret 2015, Maret 2020, September 2020, dan September 2022. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September 2013, Maret 2015, dan September 2022 terjadi setelah adanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 terjadi ketika ada pembatasan mobilitas penduduk saat pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.

Indonesia adalah salah satu negara berkembang dihadapkan pada masalah kemiskinan yang tidak bisa diabaikan. Angka kemiskinan masyarakat setiap tahunnya seolah tak pernah berkurang. Kemiskinan dikaitkan juga dengan keterbatasan hak-hak sosial, ekonomi, dan politik sehingga menyebabkan kerentanan, keterpurukan, dan ketidakberdayaan. Dalam upaya ini pemerintah harus tegas dalam menyikapi kemiskinan demi kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di pedalaman desa yang cara berfikir nya kurang berkembang.

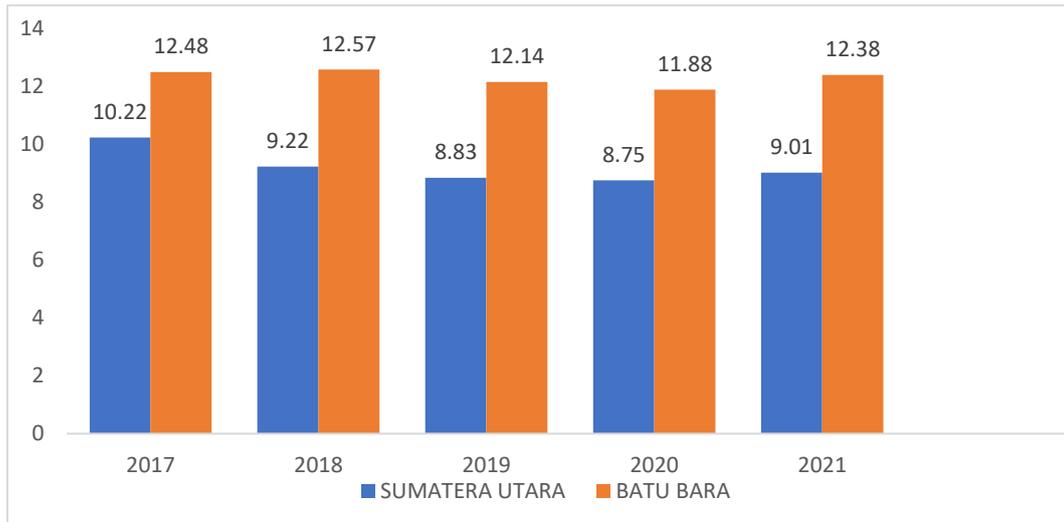
Menurut para ahli, kemiskinan itu bersifat multidimensional. Artinya, karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin aset, organisasi sosial politik dan pengetahuan serta keterampilan dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah.

Salah satu upaya pemerintah pusat dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah yaitu melalui peraturan perundang-undangan yaitu

UU NO 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 5 tentang Otonomi daerah. Otonomi daerah adalah pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah juga mendorong adanya kerjasama antar satu daerah dengan daerah lainnya. Otonomi daerah memungkinkan daerah yang lebih maju membantu daerah disekitarnya yang lemah.

Pemberian otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan daerahnya, kreativitas, inovasi dan kemandirian diharapkan akan dimiliki setiap daerah, sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat. Dan yang lebih penting adalah bahwa adanya otonomi daerah, kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat akan meningkat, baik pelayanan yang sifatnya langsung diberikan kepada masyarakat maupun pelayanan yang tidak langsung di berikan, seperti pembuatan fasilitas-fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia sebagai sebuah konsekuensi politik saat ini sudah berada pada kondisi *point no return*, sehingga aspek-aspek yang dikedepankan lebih bersifat penguatan kapasitas serta *quality improvement*. Dengan demikian, kedepannya, desentralisasi fiskal dan otonomi daerah diharapkan mampu membawa Indonesia menuju kemakmuran yang inklusif dan berkelanjutan.



Sumber : <https://sumut.bps.go.id/>

Gambar 1.3 Persentase Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Batu Bara

Dapat dilihat dari grafik di atas menunjukkan melonjaknya tingkat kemiskinan di Kabupaten Batu Bara. Fenomena ini merata terjadi di seluruh wilayah Indonesia umum dan Provinsi Sumatera Utara khususnya. Hal ini terlihat dari meningkatnya persentase kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara yang awalnya pada tahun 2020 sebesar 8,75 menjadi 9,01 pada tahun 2021. Kemungkinan hal tersebut memiliki hubungan dengan adanya Pandemi Covid-19, yang dampaknya terasa sejak Bulan Maret 2020. Mudah menularnya virus ini melalui kontak antar manusia, sehingga harus dilakukan pembatasan-pembatasan sosial secara intensif. Sehingga kondisi ini menyebabkan menurunnya aktivitas ekonomi di masyarakat. Permintaan menurun dikarenakan masyarakat tidak dapat bergerak bebas, pendapatan pun semakin terbatas terutama bagi mereka yang menggantungkan pendapatan dari berjualan untuk menghasilkan pendapatan pada hari yang sama. Dampaknya adalah menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan, sehingga berpengaruh terhadap tingkat pendapatan dan kemudian tingkat konsumsi masyarakat yang digunakan sebagai basis estimasi tingkat kemiskinan.

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan (Hasibuan, L. S. 2016)

Kabupaten Batu Bara merupakan hasil dari pemekaran Kabupaten Asahan yang dibentuk pada 15 Juni 2007, yang wilayahnya terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan diantaranya, Kecamatan Sei Balai, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Talawi, Kecamatan Air Putih, Kecamatan Sei Suka, Kecamatan Tanjung Tiram, dan Kecamatan Medang Deras. Dengan luas wilayah \pm 92.220 Ha yang sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh perairan. Kabupaten Batu Bara terletak di provinsi Sumatera Utara, dan di daerah pesisir dari kabupaten ini terdapat Desa Lalang Kecamatan Medang Deras yang penduduknya mayoritas berprofesi sebagai nelayan tradisional. nelayan sebagai mata pencaharian banyak menghadapi tantangan, baik yang disebabkan oleh keadaan cuaca atau alam maupun disebabkan oleh ulah manusia, misalnya dengan pembuangan limbah ke laut. Salah satunya menjadikan kehidupan nelayan umumnya berada di bawah garis kemiskinan.

Pentingnya pemerataan yang harus dilakukan di Kabupaten Batu Bara pasca desentralisasi fiskal agar mengurangi kesenjangan pendapatan di seluruh lapisan masyarakat, memperkecil kesenjangan antar wilayah dan pemerataan infrastruktur sehingga masalah kemiskinan bisa di selesaikan.

Permasalahan besar yang menghadang pembentukan Kabupaten Batu Bara sebagai daerah otonom adalah masalah kemandirian keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi dan terbatasnya infrastruktur daerah. Namun, kuatnya aspirasi masyarakat Batu Bara untuk membentuk Kabupaten Batu Bara menjadi suatu daerah yang otonom telah menjadi alasan utama bagi pemerintah pusat mewujudkan daerah pemekaran wilayah Kabupaten Batu Bara tersebut. Hal ini tercermin dari upaya Gerakan Masyarakat Menuju Kesejahteraan Batu Bara

(GEMKARA) dan Badan Pekerja Persiapan Pembentukan Kabupaten Batu Bara (BP3KB), yang terus memperjuangkan dalam agenda pembahasan Pemerintah dan DPR Republik Indonesia agar Batu Bara dapat disahkan menjadi daerah otonom.

Adanya otonomi daerah maka terjadi desentralisasi yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi termasuk menyusun program-program pembangunan di daerah kabupaten Batu bara yang langsung di kelola oleh pemerintah daerah.

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari APBN dalam kaitan dengan kebijakan keuangan negara yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan dan memberikan stimulus terhadap aktivitas perekonomian masyarakat.

Di lihat dari Progres Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara (PRP2 SUMUT) anggaran pendapatan APBD Kabupaten Batu Bara Tahun 2022 dengan jumlah pendapatan Rp 1.185.019.396.98. Dengan Pendapatan Asli daerah (PAD) Rp 161.997.313.940, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp.29.551.156.000, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 555.512.477.000, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 67.511.796.000, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp 165.145.321.000, Dana Intensif Daerah (DID) Rp.10.193.339.00 dan Dana Desa sebesar Rp 117.193.572.000.

Tabel 1.1 Kemiskinan di Kabupaten Batu Bara

Tahun	Total jiwa (000 jiwa)	Persentase (%)
2018	51,78	12,57
2019	50,46	12,14
2020	49,78	11,88
2021	52,59	12,38
2022	49,39	11,53

Sumber : <https://sumut.bps.go.id/>

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa persentase kemiskinan di kabupaten Batubara lebih besar di bandingkan dengan sejak tahun 2018 jumlah penduduk miskin sebesar 51,78 juta jiwa, jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 50,46 juta jiwa, pada tahun 2020 juga mengalami penurunan menjadi 49,78 juta jiwa, pada tahun 2021 jumlah kemiskinan di kabupaten batubara mengalami kenaikan yang cukup tinggi menjadi 52,59 juta jiwa, ini bisa di bilang di akibatkan karena adanya covid 19 yang melanda dunia sehingga banyaknya kegiatan yang di batasi oleh pemerintah agar tidak terlalu menyebar virus covid 19, dan di tahun 2022 jumlah kemiskinan yang ada di kabupaten batubara Kembali mengalami penurunan menjadi 49,39 juta jiwa. Persentase ini menunjukkan bahwa perkembangan penduduk miskin di kabupaten batubara mengalami penurunan yang cukup baik sempat terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin di batubara tahun 2020 karena adanya virus covid 19.

Kemiskinan selalu menjadi masalah di dalam perekonomian. Kemiskinan dapat menyebabkan rendahnya taraf hidup penduduk sehingga kebutuhan yang harus dipenuhi setiap hari menjadi terbatas. Tidak sedikit penduduk hidup dibawah garis kemiskinan, dan tidak sedikit pula penduduk hidup dibawah pendapatan yang rendah. Banyak program-program bantuan tepatnya bantuan yang diberikan sehingga menjadi penghalang dalam mengurangi angka kemiskinan. Banyak sekali penyebab yang dapat menimbulkan kemiskinan, seperti kondisi geografis yang mempengaruhinya, faktor kultural masyarakat setempat dan berbagai masalah lainnya. Di sisi lain timbulnya kemiskinan sebagai akibat pertambahan jumlah penduduk sehingga menimbulkan penduduk miskin baru.

Pemerintah kabupaten batu bara harus mencari cara agar bagaimanapun kemiskinan di kabupaten batu bara harus di kurangi setiap tahunnya, dengan demikian masyarakat dikit demi sedikit menjadi sejahtera.

PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto adalah salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau negara. Nilai PDRB mengukur seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah atau negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. PDRB sebagai indikator ekonomi berasal dari upaya untuk memahami pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau negara dan mengukur kemakmuran yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi tersebut. PDRB digunakan sebagai alat untuk memantau dan menilai kinerja ekonomi, meningkatkan pendapatan dan pengeluaran pemerintah, dan merencanakan kebijakan ekonomi. PDRB dapat memberikan gambaran tentang seberapa besar kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau negara. Dengan mengetahui sektor-sektor yang paling berkontribusi, pemerintah dapat mengarahkan investasi dan mengembangkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor tersebut.

Tabel 1.2 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Batu Bara

TAHUN	PDRB (Rupiah)
2018	77.415.555,00
2019	81.396.934,00
2020	85.362.153,00
2021	90.029.827,00
2022	98.150.709,02

Sumber : <https://sumut.bps.go.id/>

Dapat di lihat dari tabel 1.2 di atas bahwa dalam beberapa tahun terakhir PDRB perkapita di kabupaen Batu bara terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya trend positif yang di alami kabupaten Batu bara terhadap PDRB perkapitanya.

Suatu perekonomian yang berkembang pesat belum tentu jaminan yang paling baik terhadap ciri suatu daerah itu makmur, bila tidak di ikuti dengan perluasan kesempatan kerja guna menampung tenaga tenaga kerja baru yang setiap tahun. Memasuki Angkatan kerja, dalam hal ini pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional berkaitan erat dengan keperluan kesempatan kerja karena faktor produksi tenaga kerja merupakan faktor yang penting artinya bagi pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan penduduk dan hal hal yang berhubungan dengan kenikan jumlah angkatan kerja secara tradisional di anggap sebagai faktor yang positif dan merangsang pertumbuhan ekonomi artinya semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik, dengan catatan mereka mempunyai daya beli, sehingga permintaan akan meningkat.

Tabel 1.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Batu Bara

TAHUN	TPAK(%)
2018	69,47
2019	64,89
2020	69,10
2021	70,00
2022	73,50

Sumber: <https://sumut.bps.go.id/>

Dari hasil tabel diatas dari tahun 2019 sampai tahun 2022 tingkat partisipasi Angkatan kerja di kabupaten batubara cenderung mengalami kenaikan.namun berbeda dengan jumlah persentase partisipasi Angkatan kerja pada tahun 2018 sampai 2019, terjadi penurunan persentase sebesar 4,58%.

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas, maka penting dilakukan penelitian untuk mengkaji apakah variabel-variabel yang diteliti berpengaruh atau tidak terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Batu Bara. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi gambaran keadaan sebenarnya, faktor apa sajakah yang mempengaruhi kemiskinan di kabupaten Batu bara

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang di atas,maka di dapat beberapa permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini.

1. Kemiskinan itu bersifat multidimensional karena kebutuhan manusia itu bermacam macam.
2. Kemiskinan dikaitkan dengan keterbatasan hak hak social, ekonomi dan politik sehingga menyebabkan kerentanan , keterpurukan dan ketidakberdayaan.
3. Di Tahun 2021 tingkat Kemiskinan di Kabupaten Batu Bara terbilang tergolong tinggi yakni 12,38% dengan jumlah 52.590 jiwa, sedangkan jumlah TPAK nya tinggi dengan jumlah 70%.

1.3 Batasan Masalah

Ada banyak masalah yang bisa di angkat dari penelitian ini, namun penulis perlu membatasi masalah lebih terperinci dan jelas agar pemecahannya terarah. Jadi, penelitian ini hanya di batasi pada masalah faktor apa saja yang mempengaruhi kemiskinan di kabupaten Batu bara.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan kemiskinan di kabupaten Batu bara pasca desentralisasi fiskal?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Kemiskinan di kabupaten Batu bara?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Melakukan analisis ekonomi secara deskriptif tentang perkembangan kemiskinan di kabupaten Batu Bara pasca kebijakan fiskal. Tahun 2018-2022.
2. Melakukan estimasi tentang Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa (DD) dan PDRB perkapita serta TPAK terhadap Kemiskinan di Kabupaten Batu Bara Tahun 2017-2022.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaat bagi pihak – pihak yang ingin mengetahui Faktor apa saja yang mempengaruhi Kemiskinan di kabupaten Batu bara.

1.7 Manfaat Akademik

- a. Bagi Peneliti

1. Menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti agar dapat mengembangkan ilmu yang di peroleh selama mengikuti perkuliahan.
2. Sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Dan bisnis studi Pembangunan.

b. Bagi Mahasiswa

1. Melatih mahasiswa untuk menguraikan dan membahas suatu permasalahan secara ilmiah, teori dan sistematis.
2. Sebagai tambahan pembelajaran bagi mahasiswa mengenai pembahasan yang terkait.

1.8 Manfaat Non-akademik

Sebagai bahan masukan dalam penetapan bagi pemerintah. Penelitian ini di jadikan sebagai penambahan pengetahuan bagi masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah konsep pengelolaan ekonomi diperkenalkan oleh John Maynard Keynes, yang kemudian umum dipakai dunia sejak peristiwa Depresiasi Besar (Great Depression) terjadi pasca Perang Dunia I tahun 1929. Menurut Keynes, pemerintah suatu negara sebenarnya punya hak mengatur pengeluaran dan pemasukan sebuah negara dengan menetapkan pajak dan membuat kebijakan demi ekonomi makro Negara.

Dari segi defenisininya, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh baik. Lebih spesifik lagi, menurut OJK pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan tentang perpajakan, penerimaan, utang piutang, dan belanja pemerintah dengan tujuan ekonomi tertentu. Penerapan kebijakan fiskal di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, melalui Indische Comptabiliteitswet tahun 1944. Undang-undang tersebut kemudian diadaptasi pemerintah guna menyusun kebijakan fiskal di Indonesia mulai Proklamasi sampai tahun 1997 - 2003.

Pasca tahun 2003 hingga saat ini, kebijakan fiskal di Indonesia sudah tidak disadur lagi dari ICW 1944, melainkan berdasarkan pada analisa perekonomian negara dengan berlandaskan pada UUD 1945. Pihak yang memiliki wewenang

membuat kebijakan fiskal di Indonesia adalah Kementerian Keuangan RI bersama-sama dengan Presiden.

A. Tujuan Kebijakan Fiskal

1. Menjaga dan mengamankan perekonomian Negara

Poin pertama tujuan kebijakan fiskal adalah demi menjaga stabilitas sekaligus mengembangkan kondisi ekonomi negara. Penerapan kebijakan fiskal diharapkan mampu mempengaruhi seluruh sektor ekonomi negara dan memperbaiki masalah di dalamnya, mulai dari sektor korporat, perbankan, hingga usaha mikro.

2. Meningkatkan Kualitas SDM

Tujuan kebijakan fiskal salah satunya adalah meningkatkan kualitas SDM masyarakat, terutama dari segi teknologi dan perekonomian. Apabila kualitas SDM meningkat, harapannya SDM tersebut punya kapabilitas bersaing di dunia kerja nasional dan internasional, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

3. Menjaga stabilitas Harga Barang

Ada banyak faktor yang mempengaruhi harga barang dalam pasar, mulai dari faktor positif seperti meningkatnya demand sampai faktor negative seperti terjadinya penimbunan dan monopoli. Salah satu tujuan kebijakan fiskal di Indonesia adalah demi menjaga harga barang tetap terjangkau bagi masyarakat dan terhindar dari fluktuasi karena pihak tidak bertanggungjawab.

4. Mendorong Investasi

Tujuan kebijakan fiskal yang terakhir adalah untuk menciptakan iklim investasi lebih baik bagi pelaku pasar modal, utamanya investor. Sehingga negara bisa memperoleh lebih banyak pendapatan dari pajak usaha.

B. Jenis Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang terbagi menjadi beberapa kategori. Selengkapnya tentang jenis kebijakan fiskal adalah sebagai berikut:

1. Dari segi teoretis, jenis kebijakan fiskal di Indonesia terbagi 3, yaitu kebijakan fiskal fungsional, terencana, dan insidental.

a. Kebijakan Fiskal Fungsional

Pengertian kebijakan fiskal fungsional adalah kebijakan yang diambil demi meningkatkan kualitas ekonomi secara makro, dengan dampak yang baru terlihat dalam jangka panjang. Contoh kebijakan fiskal fungsional misalnya pemberian beasiswa kuliah, bantuan pendanaan start-up, dan sebagainya

b. Kebijakan Fiskal Disengaja/Terancang

Kebijakan fiskal disengaja adalah kebijakan manipulasi anggaran negara. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah untuk menghadapi masalah tertentu, misalnya pandemi dan krisis ekonomi. Contoh kebijakan fiskal disengaja adalah alokasi APBN bagi sektor Kesehatan di masa pandemi dan relaksasi pajak usaha.

c. Kebijakan Fiskal Tak Disengaja/Insidental

Kebijakan fiskal tak disengaja yaitu kebijakan berupa penetapan keputusan/aturan untuk melindungi stabilitas ekonomi sektor non- pemerintah, contohnya penetapan harga eceran tertinggi.

2. Dari Segi Penerapan

Jenis kebijakan fiskal dari segi implementasinya ada 2, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif.

a. Kebijakan Fiskal Ekspansif

Pengertian kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan yang diambil pemerintah saat ekonomi melemah dengan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau meniadakan pajak bagi sector tertentu. Fungsi kebijakan fiskal ekspansif adalah demi meningkatkan daya beli barang, sehingga perusahaan tetap bisa melakukan produksi tanpa memecat pekerja.

b. Kebijakan Fiskal Kontraktif

Jenis kebijakan fiskal dari segi penerapan berikutnya adalah kebijakan fiskal kontraktif, kebijakan menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan pajak. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah untuk mencegah inflasi dan mengurangi rasio gini.

3. Dari Segini Neraca Pembayaran

Jenis kebijakan fiskal dari segi neraca terbagi 4, yaitu kebijakan fiskal seimbang, surplus, defisit, dan dinamis.

a. Kebijakan Fiskal Seimbang

Kebijakan fiskal satu ini diambil untuk menjaga keseimbangan pemasukan dan pengeluaran negara. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah agar negara tidak punya terlalu banyak hutang. Meski terdengar positif, regulasi fiskal seimbang memiliki risiko besar, karena tidak semua negara punya kemampuan memenuhi seluruh kebutuhan warganya.

b. Kebijakan Fiskal Surplus

Pengertian kebijakan fiskal surplus adalah jenis kebijakan fiskal yang diambil ketika pemasukan lebih banyak dari pengeluaran. Fungsi kebijakan fiskal surplus adalah demi mencegah terjadinya inflasi.

c. Kebijakan Fiskal Defisit

Kebalikan dari jenis kebijakan fiskal surplus, kebijakan fiskal defisit adalah regulasi fiskal guna mengatasi kekurangan pemasukan di banding pengeluaran. Salah satu contoh kebijakan fiskal defisit adalah utang luar negeri.

d. Kebijakan Fiskal Dinamis

Jenis kebijakan fiskal terakhir dari segi penerapan adalah regulasi fiskal dinamis, yaitu kebijakan ekonomi yang diambil sewaktu-waktu saat negara membutuhkan.

C. Instrumen Kebijakan Fiskal

instrumen kebijakan fiskal adalah sektor-sektor yang dimanfaatkan pemerintah guna menjaga stabilitas ekonomi makro negara. Lebih detail tentang instrumen kebijakan fiskal di Indonesia di antaranya:

1. Pajak

Poin pertama instrumen kebijakan fiskal adalah pajak dari seluruh sektor domestik dan luar negeri. Demi mencapai tujuan kebijakan fiskal, pemerintah dapat memanipulasi pajak dalam bentuk pengurangan, penambahan, penundaan, sampai peniadaan.

2. Pengeluaran Belanja

Instrumen kebijakan fiskal berikutnya adalah pengeluaran belanja negara, yang juga bisa dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan. Apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanjanya di sektor tertentu, misalnya penundaan pembayaran THR bagi PNS.

3. Obligasi Publik

Instrumen kebijakan fiskal yang ketiga adalah penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara. Berbeda dengan utang luar negeri, obligasi publik memiliki coupon rate atau bonus komisi saat pemerintah mengembalikan pinjamannya ke masyarakat.

4. Alokasi Anggaran

Instrumen kebijakan fiskal terakhir adalah alokasi anggaran. Agar tujuan kebijakan fiskal dalam periode tertentu berhasil, pemerintah punya wewenang memindahkan alokasi anggaran dari satu sektor ke sektor lainnya. Misalnya di masa pandemi, pemerintah dapat memprioritaskan anggaran untuk fasilitas Kesehatan.

2.1.2 Kebijakan Pengeluaran Pemerintah

A. Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesobroto, 2002).

Pengeluaran pemerintah mempunyai dasar teori yang dapat dilihat dari identitas keseimbangan pendapatan nasional yaitu $Y = C + I + G + (X-M)$ yang merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Dari persamaan diatas dapat ditelaah bahwa kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan menaikkan atau menurunkan pendapatan nasional. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya (Dumairy, 2006).

Teori mengenai pengeluaran pemerintah juga dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu teori makro dan teori mikro. (Mangkoesebroto, 2002).

Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan menjadi (Boediono, 1998) :

- a. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa.
- b. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai.
- c. Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment.

Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah di pasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis transfer payment mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda.

Sedangkan dalam tinjauan mikro, perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran akan barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut, selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain (Basri, 2005).

Terkait dengan perkembangan pengeluaran pemerintah, hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu (Mangkoesebroto, 2002):

- a. Perubahan permintaan akan barang public.

- b. Perubahan dari aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.
- c. Perubahan kualitas barang public.
- d. Perubahan harga faktor produksi.

2.1.3 Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu fenomena sosial bahkan juga dianggap sebagai suatu problem yang dihadapi oleh setiap masyarakat diseluruh dunia sepanjang masa dimana, kemiskinan merupakan suatu keadaan seseorang tidak sanggup untuk memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf hidup kelompoknya, juga tidak mampu untuk memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. (Todaro, 2006:152).

Todaro (2006:232) mengatakan besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan (*proverty line*). Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut, sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, mereka hidup dibawah tingkat pendapatan riil minimum tertentu atau dibawah “garis kemiskinan internasional”, garis tersebut tidak mengenal batas antar negara, dan juga memperhitungkan perbedaan tingkat harga antar negara dengan mengukur penduduk miskin sebagai orang yang hidup kurang dari US\$ 1 atau \$2 per-hari dalam Paritas Daya Beli (PPP) sedangkan, kemiskinan relatif adalah suatu ukuran

mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, biasanya dapat didefinisikan di dalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud.

Kemiskinan adalah suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi (Sumedi dan Supadi, 2004). Sedangkan menurut Bachtiar Chamsyah (2006) menyatakan bahwa kemiskinan merupakan suatu kondisi hidup yang merujuk pada keadaan kekurangan atau kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Seseorang dikatakan miskin, apabila mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.

Menurut Nurkse lingkaran kemiskinan mengandung arti deretan melingkar kekuatan-kekuatan yang satu sama lain beraksi dan bereaksi sedemikian rupa sehingga menempatkan suatu negara miskin tetap berada dalam keadaan melarat. Si miskin, misalnya selalu kurang makan, karena kurang makan, kesehatannya menjadi buruk; karena fisiknya lemah kapasitas kerjanya rendah; karena kapasitas kerjanya rendah penghasilannya pun rendah dan itu berarti ia miskin, akhirnya ia tidak akan mempunyai cukup makan dan seterusnya. Bila keadaan seperti ini dikaitkan dengan negara secara keseluruhan dapat dikemas ke dalam dalil kuno : “Suatu negara miskin karena ia miskin (Jhingan, M.L, 2010).

Menurut (*World Bank, 2006*) salah satu penyebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*). Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang

dikategorikan miskin (*the poor*) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai.

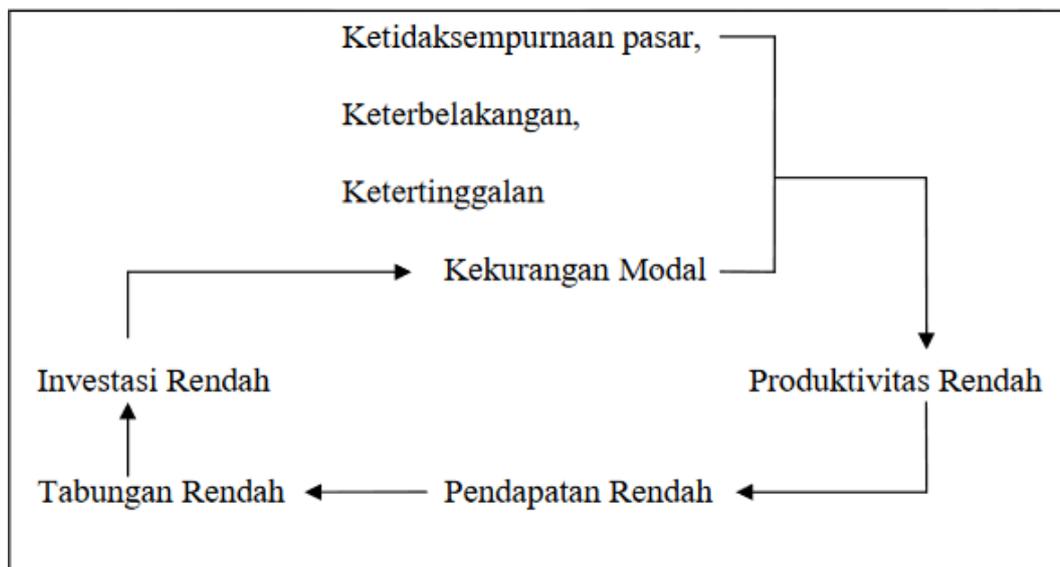
Menurut Adisasmita, (2005) indikator-indikator kemiskinan yang digunakan secara umum adalah tingkat upah, pendapatan, konsumsi, mortalitas anak usia balita, imunisasi, kekurangan gizi anak, tingkat fertilitas, tingkat kematian ibu, harapan hidup rata-rata, tingkat penyerapan anak usia sekolah dasar, proporsi pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, pemenuhan bahan pangan (kalori/protein), air bersih, perkembangan penduduk, melek huruf, urbanisasi, pendapatan per kapita, dan distribusi pendapatan. Tolok ukur kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan pangan dan tingkat pendapatan yang rendah, akan tetapi melihat tingkat kesehatan, pendidikan dan perlakuan adil dimuka hukum dan sebagainya (Adisasmita,2015).

b. Penyebab Kemiskinan

Sharp, et. al. (dalam Kuncoro, 2011:69), mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapat yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dengan jumlah terbatas dan kualitas yang rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktifitasnya rendah, yang pada gilirannya upah yang didapat juga rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung. Adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Ketiga penyebab kemiskinan ini bersumber dari teori lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Teori ini mengatakan “*a poor country is poor because it is poor*” yang artinya negara miskin karena dia miskin. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan ini akan berdampak pada rendahnya tabungan dan investasi. Maka dari itu, setiap tindakan untuk pengentasan kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan ini (Nurske, dalam Kuncoro 2006:210)

Lingkaran Setan Kemiskinan



Gambar 2.1 Lingkaran Kemsikinan

c. Ukuran kemiskinan

Kemiskinan memiliki banyak definisi, dan sebagian besar sering mengaitkan konsep kemiskinan dengan aspek ekonomi. Berbagai upaya untuk mendefinisikan kemiskinan dan mengidentifikasi kemiskinan sebenarnya

menghasilkan suatu konsep pemikiran yang dapat disederhanakan. Pertama, dari sudut pandang pengukuran, kemiskinan dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan relatif. Kedua dari sudut pandang penyebab, kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi kemiskinan alamiah dan struktural. Salah satu syarat penting agar suatu kebijakan pengentasan kemiskinan dapat tercapai maka harus ada kejelasan mengenai kriteria tentang siapa atau kelompok masyarakat mana yang masuk ke dalam kategori miskin dan menjadi sasaran program. Selain itu ada syarat yang juga harus dipenuhi yaitu harus dipahami secara tepat mengenai penyebab kemiskinan itu sendiri di masing-masing komunitas dan daerah/wilayah. Karena penyebab ini tidak lepas dari adanya pengaruh nilai-nilai lokal yang melingkupi kehidupan masyarakatnya.

Kemiskinan seringkali ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran dan keterbelakangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya terhadap kegiatan ekonomi sehingga akan tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. Ukuran kemiskinan dilihat dari tingkat pendapatan dapat dikelompokkan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif (Kartasamita, Ginandjar: 1996: 234-235).

Seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila pendapatannya lebih rendah dari garis kemiskinan absolut atau dengan istilah lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Ukuran garis kemiskinan yang digunakan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) berdasarkan pendekatan kemiskinan absolut, dengan mengacu pada definisi kemiskinan oleh Sayogyo (2000). Diukur dengan menghitung jumlah penduduk yang memiliki pendapatan perkapita yang tidak mencukupi untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang

nilainya ekuivalen dengan 20 kg beras per kapita perbulan untuk daerah pedesaan, dan 30 kg beras untuk daerah perkotaan. Standar kecukupan pangan dihitung setara 2.100 kilo kalori per kapita per hari ditambah dengan pengeluaran untuk kebutuhan non makanan (perumahan, berbagai barang dan jasa, pakaian).

Kemiskinan relatif pada dasarnya menunjuk pada perbedaan relatif tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat. Mereka yang berada dilapis terbawah dalam persentil derajat kemiskinan suatu masyarakat digolongkan sebagai penduduk miskin. Dalam kategori seperti ini, dapat saja mereka yang digolongkan sebagai miskin sebenarnya sudah dapat mencukupi hak dasarnya, namun tingkat keterpenuhannya berada dilapisan terbawah. Kemiskinan relatif memahami kemiskinan dari dimensi ketimpangan antar kelompok penduduk. Pendekatan ketimpangan tidak berfokus pada pengukuran garis kemiskinan, tetapi pada besarnya perbedaan antara 20 atau 10 persen masyarakat paling bawah dengan 80 atau 90 persen masyarakat lainnya. Kajian yang berorientasi pada pendekatan ketimpangan tertuju pada upaya memperkecil perbedaan antara mereka yang berada dibawah (miskin) dan mereka yang makmur dalam setiap dimensi statifikasi dan diferensiasi sosial. Ketimpangan merupakan suatu permasalahan yang berbeda dengan kemiskinan.

d. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan salah satu indikator kemiskinan yang menyatakan rata-rata pengeluaran makanan dan non-makanan per kapita pada kelompok referensi (*reference population*) yang telah ditetapkan (BPS, 2004).

Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marjinal, yaitu mereka yang hidupnya dikategorikan berada sedikit di atas garis kemiskinan. Berdasarkan definisi dari BPS, garis kemiskinan dapat diartikan sebagai batas konsumsi minimum dari kelompok masyarakat marjinal yang berada pada referensi pendapatan sedikit lebih besar daripada pendapatan terendah. Pada prinsipnya, indikator garis kemiskinan mengukur kemampuan pendapatan dalam memenuhi 36 kebutuhan pokok/dasar atau mengukur daya beli minimum masyarakat di suatu daerah. Konsumsi yang dimaksudkan dalam garis kemiskinan ini meliputi konsumsi untuk sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan (Suryawati, 2004: 123).

Garis kemiskinan BPS menggunakan pendekatan berdasarkan pada pengeluaran dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Definisi kemiskinan yang digunakan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dalam penentuan garis kemiskinan tersebut, cara yang dilakukan adalah menghitung besarnya pengeluaran seseorang dalam memenuhi kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori perhari ditambah dengan pengeluaran untuk 52 jenis komoditas bukan makanan yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan (Asra, 2011). Dengan demikian, penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan tersebut.

e. Ciri-ciri kemiskinan

Emil Salim (1982) dari kutipan jurnal (Togar Saragih 2006:59), mengemukakan ciri-ciri orang miskin adalah :

- Umumnya tidak memiliki faktor produksi, seperti tanah, modal dan keterampilan. Faktor produksi yang dimiliki kecil, sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan terbatas
- Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh asset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan yang di peroleh tidak cukup memperoleh tanah Garapan atau modal usaha, disamping itu tidak terpenuhinya syarat untuk mendapatkan kredit perbankan, menyebabkan mereka berpaling ke rentenir.
- Tidak memiliki tanah, jika Adapun relatif kecil. Mereka umumnya jadi buruh tania tau pekerja kasar di luar pertanian. Pekerjaan pertanian bersifat musiman, menyebabkan kesinambungan kerja kurang terjamin. Mereka umumnya sebagai pekerja bebas, akibatnya dalam situasi penawaran tenaga kerja tingkat upah menjadi rendah dan mendukung atau mempertahankan mereka untuk selalu hidup dalam kemiskinan.

f. Teori kemiskinan

Di kutip dari jurnal (yulianto kadji) beberapa teori kemiskinan menurut para ahli :

Kotze (dalam Hikmat, 2004:6) menyatakan bahwa masyarakat miskin memiliki kemampuan yang relatif baik untuk memperoleh sumber melalui kesempatan yang ada. Kendatipun bantuan luar kadang-kadang digunakan, tetapi tidak begitu saja dapat dipastikan sehingga masyarakat bergantung pada dukungan dari luar. Pendekatan pemberdayaan ini dianggap tidak berhasil karena tidak ada

masyarakat yang dapat hidup dan berkembang bila terisolasi dari kelompok masyarakat lainnya. Pengisolasian ini menimbulkan sikap pasif, bahkan keadaan menjadi semakin miskin.

Selanjutnya Supriatna (1997:90) menyatakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal.

Bank Dunia (1990) dalam laporannya di hadapan anggota PBB bertitel "Poverty and Human Development" mengatakan bahwa: *"The case for human developemnt is not only or even primarily an economic one. Less hunger, fewer child death, and better change of primary education are almost universally accepted as important ends in themselves"* (pembangunan manusia tidak hanya diutamakan pada aspek ekonomi, tapi yang lebih penting ialah mengutamakan aspek pendidikan secara universal bagi kepentingan diri orang miskin guna meningkatkan kehidupan sosial ekonominya).

Booth dan Me Cawley (Dalam Moeljarto T., 1993) menyatakan bahwa "di banyak negara memang terjadi kenaikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari pendapatan perkapitanya, tetapi itu hanya dapat dinikmati oleh sebagian

kecil masyarakatnya,, sedangkan sebagian besar masyarakat miskin kurang memperoleh manfaat apa-apa, bahkan sangat dirugikan".

2.1.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

1. Pengertian produk domestik regional bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar. (BPS, 2012).

Menurut Todaro (2002) PDRB adalah nilai total atas segenap output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian di tingkat daerah (baik itu yang dilakukan oleh penduduk daerah maupun penduduk dari daerah lain yang bermukim di daerah tersebut).

Angka PDRB sangat diperlukan dan perlu disajikan, karena selain dapat dipakai sebagai bahan analisa perencanaan pembangunan juga merupakan barometer untuk mengukur hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

2. Metode perhitungan PDRB

a. Metode langsung

1) Pendekatan produksi

Dengan pendekatan Produksi (production approach) produk nasional atau produk domestik bruto diperoleh dengan menjumlahkan nilai pasar dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor dalam perekonomian. Dengan demikian, GNP atau GDP menurut pendekatan produksi ini adalah penjumlahan dari masing-masing barang dan jasa dengan jumlah atau kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan, hal ini secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$Y = (Q_1 \times P_1) + (Q_2 \times P_2) + (Q_3 \times P_3) + \dots + (Q_n \times P_n)$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Nasional

Q₁, Q₂, Q₃, dan Q_n = jumlah jenis barang ke-1, ke-2, ke-3, ke-n

P₁, P₂, P₃, dan P_n = harga jenis barang ke-1, ke-2, ke-3, ke-n

2) Pendekatan pendapatan

Pendekatan pendapatan (income approach) adalah suatu pendekatan dimana pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang menyumbang terhadap proses produksi. Dalam hubungan ini pendapatan nasional adalah penjumlahan dari unsur-unsur atau jenis-jenis pendapatan.

- a. Kompensasi untuk pekerja (compensation for employees), yang terdiri dari upah (wages) dan gaji (salaries) ditambah faktor rent terhadap upah

dan gaji (misalnya kontribusi pengusaha untuk rencana-rencana pensiun dan dana jaminan sosial), dan ini merupakan komponen terbesar dari pendapatan nasional.

- b. Keuntungan perusahaan (corporate profit), yang merupakan kompensasi kepada pemilik perusahaan yang mana sebagian dari padanya digunakan untuk membayar pajak keuntungan perusahaan (corporate profit taxes), sebagian lagi dibagikan kepada para pemilik saham (stockholders) sebagai deviden, dan sebagian lagi ditabung perusahaan sebagai laba perusahaan yang tidak dibagikan.
- c. Pendapatan usaha perorangan (proprietors income), yang merupakan kompensasi atas penggunaan tenaga kerja dan sumber-sumber dari self employed person, misalnya petani, self employed profesional, dan lainlain. dengan perkataan lain proprietors income merupakan pendapatan new korporasi.
- d. Pendapatan sewa (rental income of person), yang merupakan kompensasi untuk pemilik tanah, rental business dan residential properties, termasuk didalamnya pendapatan sewa dari mereka yang tidak terikat dalam bisnis real estate : pendapatan sewa dihitung untuk rumah-rumah yang non form yang dihuni oleh pemiliknya sendiri; dan royalties yang diterima oleh orang dari hak paten, hak cipta, dan hak terhadap sumber daya alam.
- e. Bunga netto (net interest) terdiri atas bunga yang dibayar perusahaan dikurangi oleh bunga yang diterima oleh perusahaan ditambah bunga netto yang diterima dari luar negeri. Bunga yang dibayar oleh pemerintah dan yang dibayar oleh konsumen tidak termasuk didalamnya. Secara

matematis pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pendapatan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NI = Y_w + Y_i + Y_{nr} + Y_{nd}$$

Dimana:

Y_w = Pendapatan dari upah, gaji dan pendapatan lainnya sebelum pajak

Y_r = Pendapatan dari bunga

Y_{nr} dan Y_{nd} = Pendapatan dari keuntungan dari perusahaan dan pendapatan lainnya sebelum pendapatan lainnya sebelum pengenaan pajak.

3) Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran adalah pendekatan pendapatan nasional atau produk domestik regional bruto diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai pasar dari seluruh permintaan akhir (final demand) atas output yang dihasilkan dalam perekonomian, diukur pada harga pasar yang berlaku. Dengan perkataan lain produk nasional atau produk domestik regional bruto adalah penjumlahan nilai pasar dari permintaan sektor rumah tangga untuk barang-barang konsumsi dan jasa-jasa (C), permintaan sektor bisnis barang-barang investasi (I), pengeluaran pemerintah untuk barang-barang dan jasa-jasa (G), dan pengeluaran sektor luar negeri untuk kegiatan ekspor dan impor (X-M).

b. Metode tidak langsung

Menghitung nilai tambah suatu kelompok ekonomi dengan mengalokasikan nilai tambah kedalam masing-masing kelompok kegiatan ekonomi pada tingkat regional sebagai alokator digunakan yang paling besar tergantung atau erat

kaitannya dengan produktifitas kegiatan ekonomi tersebut melalui PDRB menurut harga berlaku dan harga konstan. Pendapatan regional suatu provinsi dapat diukur untuk menghitung kenaikan tingkat pendapatan masyarakat. Kenaikan ini dapat disebabkan karena dua faktor yaitu:

- a. Kenaikan pendapatan yang benar-benar bisa menaikkan daya beli penduduk (kenaikan riil).
- b. Kenaikan pendapatan yang disebabkan oleh karena inflasi, kenaikan pendapatan yang disebabkan karena kenaikan harga pasar tidak menaikkan daya beli penduduk dan kenaikan seperti ini merupakan kenaikan pendapatan yang tidak riil. Oleh karena itu berdasarkan kenyataan diatas untuk mengetahui kenaikan pendapatan yang sebenarnya (riil) maka faktor yang harus dieliminir pendapatan regional dengan faktor inflasi (faktor inflasi belum dihilangkan) merupakan pendapatan regional dengan harga berlaku, sedangkan pendapatan regional dimana faktor inflasi tidak lagi diperhitungkan disebut dengan pendapatan regional atas dasar harga konstan.

2.1.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. TPAK merupakan indikator yang biasa digunakan untuk menganalisa partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah penduduk yang

termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi (Simanjuntak, 2003).

Sedangkan menurut Menurut Badan Pusat Statistik (2021), Penduduk usia kerja merupakan penduduk yang berusia mulai dari 15 tahun sampai usia 64 tahun. Sedangkan penduduk bukan usia kerja adalah penduduk dengan usia 0 sampai 14 tahun dan penduduk usia lebih dari 65 tahun. Pada penduduk usia kerja terbagi lagi menjadi 2 macam, yaitu penduduk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Menurut Badan Pusat Statistik (2021), penduduk yang tergolong angkatan kerja adalah penduduk yang berusia 15 sampai 64 tahun dan memiliki pekerjaan/ sementara tidak bekerja/ pengangguran. Kemudian pada penduduk bukan angkatan kerja adalah penduduk yang berusia 15 sampai 64 tahun tetapi masih bersekolah/ menjadi pengurus rumah tangga/ melakukan kegiatan lain diluar dari kegiatan pribadi.

TPAK merupakan ukuran tingkat partisipasi penduduk dalam Angkatan kerja yang dapat memberikan gambaran yang jelas sampai seberapa jauh sebenarnya penduduk yang termasuk usia kerja benar-benar aktif di dalam bekerja dan tidak aktif bekerja. Jadi, TPAK perbandingan antara Angkatan kerja penduduk dalam usia kerja. Semakin besar jumlah penduduk usia kerja, akan menyebabkan

semakin besarnya Angkatan kerja. Untuk menghitung tingkat partisipasi Angkatan kerja (TPAK) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{TPAK} = \text{PK/PUK} \times 100\%$$

Keterangan :

TPAK = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

PK = Penduduk Kerja

PUK = Penduduk Usia kerja

Semakin besar tingkat partisipasi Angkatan kerja merupakan dampak dari semakin besar jumlah Angkatan kerja. Begitupun sebaliknya, semakin besar jumlah penduduk yang bukan Angkatan kerja (masih sekolah/mengurus rumah tangga) maka semakin kecil jumlah Angkatan kerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya TPAK :

a. Jumlah Penduduk yang masih bersekolah.

Semakin besar jumlah penduduk yang bersekolah, semakin kecil jumlah angkatan kerja dan semakin kecil TPAK. Jumlah penduduk yang bersekolah dipengaruhi oleh tingkatan penyediaan fasilitas pendidikan dan kondisi serta tingkat penghasilan keluarga.

b. Jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga.

Semakin banyak anggota dalam tiap-tiap keluarga yang mengurus rumah tangga semakin kecil TPAK.

c. Struktur Umur

Penduduk yang berumur muda umumnya tidak mempunyai tanggung jawab yang begitu besar sebagai pencari nafkah untuk keluarga. Bahkan mereka umumnya bersekolah. Penduduk dalam kelompok umur 25-55 tahun, terutama laki-laki, umumnya dituntut untuk mencari nafkah. Oleh sebab itu TPAK relatif besar. Selanjutnya penduduk di atas umur 55 tahun sudah mulai menurun kemampuan untuk bekerja, dan TPAK umumnya rendah.

d. Tingkat Upah

Semakin tinggi tingkat upah dalam masyarakat, semakin tinggi anggota keluarga yang tertarik masuk pasar kerja, atau dengan kata lain semakin tinggi TPAK.

e. Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin banyak waktu yang disediakan untuk bekerja. Terutama bagi para wanita, dengan semakin tinggi tingkat pendidikan, kecenderungan untuk bekerja semakin besar. Keadaan ini menunjukkan bahwa TPAK semakin besar pula.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul penelitian	Model estimasi	Variabel	Hasil penelitian
1	Irma Setiawati (2017), pengaruh produk domestik regional bruto, Pendidikan dan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten pinrang	Analisi regresi berganda	Kemiskinan, Produk Domestik Regional Bruto, Pendidikan dan Tenaga Kerja.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten Pinrang. Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat

				kemiskinan di kabupaten Pinrang. Dan tenaga kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten Pinrang.
2	Ilham ksatria (2020), Pengaruh produk domestik regional bruto sektoral terhadap kemiskinan di Indonesia	Kuantitatif	Produk domestik regional bruto, kemiskinan	Hasil daripada penelitian menunjukkan bahwa PDRB sektor primer serta sektor sekunder berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. PDRB sektor tersier tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Temuan tersebut mengimplikasikan meningkatkan kesempatan kerja di semua sektor perekonomian.
3	Dhea Cahya Nilam Triana (2020), Analisis Faktor-Faktor Pembentuk Kemiskinan Pulau Jawa Periode 2013-2021	Sekunder	Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Upah Minimum Regional, Indeks Gini	Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan indeks gini dan upah minimum regional tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Pulau Jawa selama periode 2013-2021.
4	Nurul Pratiwi dan Eni Setyowati (2022), Analisis Pengaruh Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah terhadap Kemiskinan di Karesidenan Surabaya Tahun 2015-2020	Regresi data panel	Kemiskinan, Pengangguran, IPM, Upah	variabel pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan sedangkan IPM berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Sementara itu, variabel upah tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

2.3 Regulasi

2.3.1 Desentralisasi Fiskal

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi fiskal adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola pembangunan guna mendorong perekonomian daerah maupun nasional melalui mekanisme hubungan keuangan yang lebih baik agar tercipta kemudahan kemudahan dalam pelaksanaan

pembangunan di daerah, sehingga berimbas kepada kondisi perekonomian yang lebih baik yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat (Rochjadi, 2004).

Dalam teori ekonomi publik dibahas mengenai berbagai permasalahan yang berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan pusat. Musgrave menjelaskan tentang ketiga fungsi pokok pemerintahan yang terdiri dari fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Menurut Musgrave terdapat dua faktor yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah secara ekonomi suatu fungsi akan lebih baik dilaksanakan terpusat (sentralisasi) ataukah didesentralisasikan. Faktor yang pertama adalah eksternalitas dan uang, yang kedua ialah preferensi (Azwardi & Abukosim, 2007).

Pada dasarnya transfer pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah dapat dibedakan atas bagi hasil pendapatan (*revenue sharing*) dan bantuan (*grants*). Adapun tujuan dari transfer ini adalah pemerataan *vertical* (*vertical equalization*), pemerataan *horizontal* (*horizontal equalization*), mengatasi persoalan efek pelayanan publik (*correcting spatial externalities*), mengerahkan prioritas (*redirecting priorities*), melakukan eksperimen dengan ide-ide baru, stabilisasi dan kewajiban untuk menjaga tercapainya Standar Pelayanan Minimum (SPM) di setiap daerah (Hermawan, 2007).

Di dalam peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.07/2013 tentang pengalokasian anggaran transfer ke daerah, transfer ke daerah adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian.

2.3.2 Dana Desa

Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Sumber dan penyaluran dana desa berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD). Di alokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

Alokasi dasar, dan

- Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka

kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

2.3.3 Kebijakan Dana Desa

Berdasarkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (2016), Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala Desa. Setiap tahun Desa akan mendapatkan Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat yang penyalurannya dilakukan melalui kabupaten/kota.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

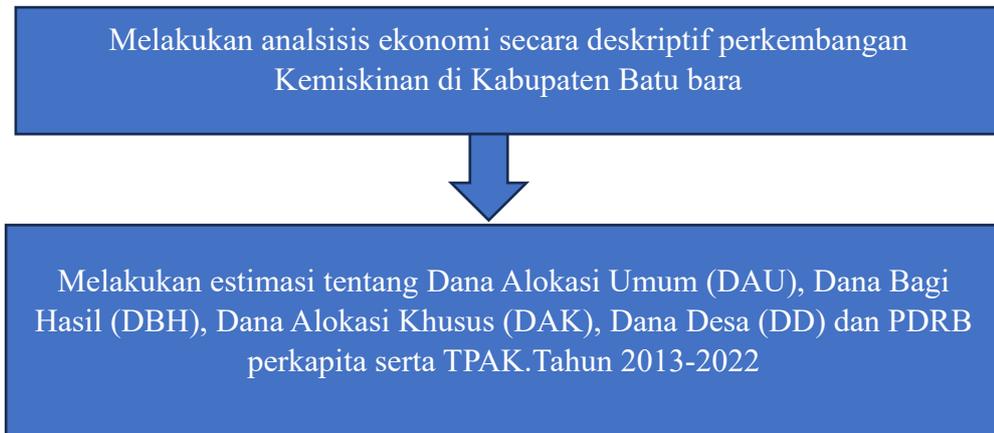
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap Desa berdasarkan jumlah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing Desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.

2.4 Kerangka Penelitian

2.4.1 Tahap Penelitian

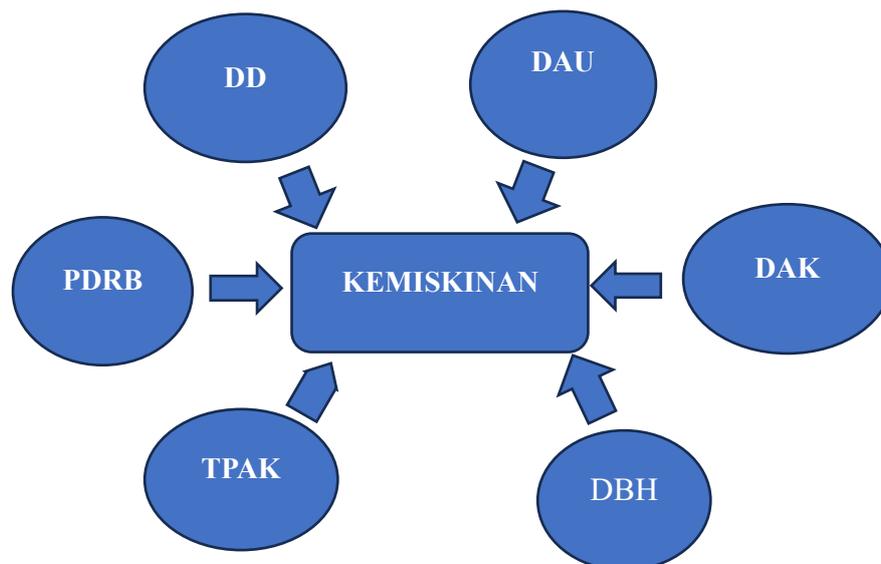
Secara umum, terdapat beberapa indikator yang dianggap mempengaruhi tingkat kemiskinan yaitu : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dana Desa (DD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

2.4.2 Kerangka Analisis



Gambar 2.2 kerangka analisis

2.4.3 Kerangka Konseptual Analisis



Gambar 2.3 kerangka konseptual

2.5 Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian, landasan teori dan penelitian-penelitian terdahulu, terdapat pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Tingkat Kemsiskinan di Kabupaten Batu Bara.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah dan prosedur yang dilakukan dalam mengumpulkan informasi empiris guna memecahkan masalah dan menguji hipotesis dari sebuah penelitian.

3.1 Pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah miniriset kuantitatif, yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antar variabel yang telah di tentukan untuk menjawab rumusan masalah. Data yang akan disajikan adalah data time series yaitu data yang disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu.

3.2 Defenisi operasional

Defenisi operasional merupakan acuan dari tinjauan Pustaka yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variable yang satu dengan variable yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan data yang diinginkan. Adapun variable yang terdapat dalam penelitian ini ialah:

Tabel 3.1 Defenisi Operasional

Kategori	Variabel	Defenisi	Sumber Data
Variabel Terikat	TK	Tingkat Kemiskinan (%)	https://sumut.bps.go.id/
Variabel Bebas	DAU	Dana Alokasi Umum (Ribuan Rupiah)	www.kemenkeu.go.id
Variabel Bebas	DAK	Dana Alokasi Khusus (Ribuan Rupiah)	www.kemenkeu.go.id
Variabel Bebas	DBH	Dana Bagi Hasil (Ribuan Rupiah)	www.kemenkeu.go.id
Variabel Bebas	DD	Dana Desa (Ribuan Rupiah)	www.kemenkeu.go.id
Variabel Bebas	PDRB kap	Produk Domestik Regional Bruto perkapita (rupiah)	https://sumut.bps.go.id/
Variabel Bebas	TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	https://sumut.bps.go.id/

3.3 Tempat dan waktu penelitian

a. tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan melihat data di kabupaten batu bara, provinsi sumatera utara. Dengan melihat data yang di sediakan oleh BPS (Badan Pusat Statistik).

b. waktu penelitian

waktu penelitian ini di rancang selama 3 bulan dari mulai juni sampai dengan agustus 2023.

3.4 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengambilan data sekunder melalui wibesite resmi Badan Pusat Statistik (BPS), dengan objek penelitian Kabupaten batu bara.

3.5 Teknik analisis data

3.5.1 Analisi Ekonomi Secara Deskriptif Tentang Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Batu Bara Pasca Kebijakan fiskal

Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode analisa sederhana yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi observasi dengan menyajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun narasi dengan tujuan memudahkan pembaca dalam menafsirkan hasil penelitian. Metode analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan Kemiskinan di kabupaten Batu Bara pasca kebijakan fiskal.

3.5.2 Analisis Model Ekonometrika

1. Uji Asumsi klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk melihat yang destimasi telah memenuhi asumsi klasik dari regresi berganda atau belum, sehingga nilai koefisien regresinya mendeteksi nilai sebenarnya. Jika model yang digunakan memenuhi syarat tersebut, berarti tidak ada masalahnya dalam menggunakan metode regresi berganda. Untuk memperoleh model yang baik, model harus terbebas dari masalah-masalah dalam regresi yaitu multikolinearitas, normalitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi. (Gujarati, 2006: 183)

A. . Uji Multikolinearitas

Multikolinieritas berhubungan dengan situasi dimana ada linear baik yang pasti atau mendekati pasti antara variabel independen. Masalah multikolinieritas timbul bila variabel-variabel independen berhubungan satu sama lain. Selain mengurangi kemampuan untuk menjelaskan dan memprediksi, multikolinieritas juga menyebabkan kesalahan baku koefisien (uji t) menjadi indikator yang tidak terpercaya (Gujarati, 2003)

Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk mengetahui hubungan linier yang terjadi diantara variabel-variabel independen. Untuk menguji gejala multikolinearitas dapat dilakukan dengan menghitung Variance Inflation Factor (VIF) dari hasil estimasi. Apabila nilai $VIF < 10$ maka tidak terdapat multikolinearitas diantara variabel independen, dan sebaliknya jika nilai > 10 maka terdapat multikolinearitas

B. Uji Normalitas

Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya .

Pengujian distribusi normal bertujuan untuk melihat apakah sampel yang diambil mewakili distribusi populasi. Jika distribusi sampel adalah normal, maka dapat dikatakan sampel yang diambil mewakili populasi. Prinsip uji distribusi normal adalah membandingkan antara distribusi data yang didapat dengan distribusi data normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah

satunya adalah uji Kolmogorov Smirnov. Uji Kolmogorov Smirnov dapat menggunakan program analisis statistik SPSS. Apabila nilai probabilitas $\geq 0,05$ maka data dinyatakan berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka dapat dinyatakan berdistribusi tidak normal.

C. Uji Heteroskedastisitas

Dalam heteroskedastisitas, varian setiap gangguan tidak konstan. Akibatnya, proses estimasi menjadi tidak efisien, sedangkan hasil estimasinya sendiri konsisten dan tidak bias; dengan demikian, hasil uji t dan uji f tidak dapat diandalkan atau tidak dapat ditolak.

Uji White dapat digunakan untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas. Pengujian ini dilakukan secara manual dengan melakukan regresi kuadrat dengan mengkuadratkan variabel bebas dan mengalikan variabel bebas. Nilai R² yang didapat digunakan untuk menghitung χ^2 , dimana $\chi^2 = n \cdot R^2$ (Gujarati, 2003). Dimana pengujiannya adalah jika nilai *probabilitas Observation R-Squared* lebih besar dari taraf nyata 5 persen. Maka hipotesis alternatif adanya heteroskedastisitas dalam model ditolak. Namun apabila Apabila nilai dari probabilitas chi-square $> 0,05$ ($\alpha = 5\%$), dapat dikatakan bahwa dalam model tersebut tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

D. Uji Autokolerasi

Uji autokorelasi yang dapat muncul karena adanya observasi yang berurutan sepanjang waktu dan saling berkaitan satu sama lainnya (Ghozali, 2016). Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya).

Terdapat berbagai metode yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya gejala autokorelasi. Dalam penelitian ini digunakan *Breusch- Godfrey Serial Correlation LM Test*. *Breusch-Godfrey* mengembangkan uji autokorelasi yang lebih umum dan dikenal dengan uji *Lagrange Multiplier* (LM). Kriterianya adalah jika nilai probabilitas lebih besar dari ($>$) $\sigma = 5\%$ berarti tidak terkena autokorelasi. sebaliknya ketika nilai probabilitasnya lebih kecil atau sama dengan ($<$) dari $\sigma = 5\%$ berarti terdapat autokorelasi.

2. Model Estimasi

Penelitian ini mengenai perkembangan tingkat kemiskinan dengan menggunakan data times series yaitu data runtun waktu 6 tahun (dari tahun 2017–2022) , model ekonometrika pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$K_t = \beta_0 + \beta_1 DAU_t + \beta_2 DAK_t + \beta_3 DBH_t + \beta_4 DD + \beta_5 PDRB_{kap} + \beta_6 TPAK + \varepsilon$$

Dimana :

K_t	= Tingkat Kemiskinan dalam satuan %
DAU_t	= Dana Alokasi Umum $_t$
DAK_t	= Dana Alokasi Khusus $_t$
DBH_t	= Dana Bagi Hasil $_t$
DD_t	= Dana Desa $_t$
$PDRB_{kap_t}$	= Produk Domestik Regional Bruto perkapita $_t$
$TPAK_t$	= Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja $_t$
β_0	= Konstanta
β_1, β_2	= Koefisien
t	= Unit waktu (2018 -2022)
ε	= Error tern

Setelah model penelitian diestimasi maka akan diperoleh nilai dan besaran masing-masing parameter dalam model persamaan diatas. Nilai dari parameter positif dan negatif selanjutnya akan diperoleh untuk menguji hipotesa penelitian.

3. Metode Estimasi

Metode estimasi pada penelitian ini adalah untuk mengestimasi semua variable yang diamati menggunakan data data runtut waktu (*time series*) dalam kurun waktu 6 tahun (dari tahun 2017 sampai 2022). Analisis trend dalam kurun waktu tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan metode kuadrat terkecil atau OLS (*Ordinary Least Square*) dalam bentuk regresi linier berganda (*multiple regression model*) yang disajikan lebih sederhana serta mudah dipahami.

Asumsi-asumsi yang mendasari model regresi linear dengan menggunakan metode OLS adalah sebagai berikut:

1. Nilai rata-rata disturbance tern = 0
2. Tidak terdapat Korelasi serial (serial auto correlation) diantara *disturbance tern* $COV(\epsilon_t, \epsilon_j) = 0 : I \neq j$
3. Sifat *homocedasticity* dari *disturbance tern* $Var(\epsilon^i) = \sigma^2$
4. *Covariance* antar ϵ^i dari setiap variabel bebas (x) = 0 setiap variabel bebas(x) = 0
5. Tidak terdapat bias dalam spesifikasi model regresi. Artinya, model regresi yang diuji secara tepat telah dispesifikasikan atau diformulasikan.
6. Tidak terdapat *collinearity* antara variabel-variabel bebas. Artinya, variabel-variabel bebas tidak mengandung hubungan linier tertentu antara sesamanya.
7. Jika model berganda yang diestimasi melalui OLS memenuhi suatu set asumsi (asumsi gauss-markov), maka dapat ditunjukkan bahwa parameter

yang diperoleh adalah bersifat BLUE (*best linear unbiased estimator*).
(Gujarati, 2013).

4. Tahapan Analisa

a. Korelasi (r)

Koefisien korelasi merupakan derajat keeratan antara variabel terikat dengan variabel bebas yang diamati. Koefisien korelasi biasanya dilambangkan dengan huruf r dimana bervariasi mulai -1 sampai +1. Nilai r -1 atau +1 menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel-variabel tersebut, jika nilai $r = 0$, mengindikasikan tidak ada hubungan antara variabel-variabel tersebut. Sedangkan tanda + (positif) dan - (negatif) memberikan informasi mengenai arah dari hubungan antara variabel-variabel tersebut.

b. Uji Parsial (uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat (Gujarati, 2013). Uji t dilakukan untuk melihat signifikan dari pengaruh DAU, DAK, DBH, DD, PDRBkap dan TPAK terhadap K. Dalam hal ini pengujian dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Perumusan Hipotesis

Hipotesis $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = \beta_6 = 0$ (tidak ada hubungan yang signifikan antara masing-masing variabel DAU, DBH, DAK, DD, PDRBkap dan TPAK terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten Batu bara).

Hipotesis $H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq \beta_5 \neq \beta_6 \neq 0$ (ada hubungan yang signifikan antara masing-masing variabel DAU, DAK, DBH, DD, PDRBkap dan TPAK terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten Batu bara).

2. Uji stastitik yang digunakan adalah uji t. dimana t hitung adalah:

$$t_h = \frac{\beta_i}{se-\beta_i} \dots \dots \dots (3.4)$$

dimana:

$\beta_1 =$ DAU

$\beta_2 =$ DAK

$\beta_3 =$ DBH

$\beta_4 =$ DD

$\beta_5 =$ PDRBkap

$\beta_6 =$ TPAK

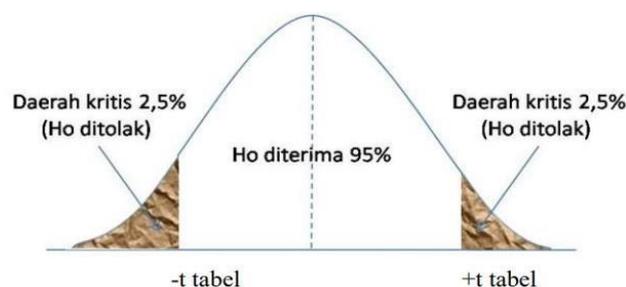
se $\beta_i =$ Standar eror β_i

Nilai t_{hitung} akan dibandingkan dengan $t_{tabel} = \pm t (\alpha / 2, n - 1)$

3. Kriteria uji:

Terima H_0 jika $-t_{tabel} < t_{hitung} < +t_{tabel}$, hal lain tolak H_0

atau dalam distribusi kurva normal t dapat digambarkan sebagai berikut:



4. Kesimpulan:

Sesuai kriteria uji maka terima H_0 atau tolak H_0 .

c. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pada model DAU, DAK, DBH, DD, PDRBKAP dan TPAK secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap tingkat Kemiskinan kabupaten Batu bara Dengan langkah Langkah sebagai berikut:

1. Perumusan Hipotesis

Hipotesis $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = \beta_6 = 0$ (tidak ada hubungan yang signifikan secara serentak antara variabel DAU, DAK, DBH, DD PDRBKAP, dan TPAK terhadap kemiskinan di kabupaten Batu bara).

Hipotesis $H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq \beta_5 \neq \beta_6 \neq 0$ (ada hubungan yang signifikan secara serentak antara variabel DAU, DAK, DBH, DD, PDRBKAP, dan TPAK terhadap kemiskinan di kabupaten Batu bara).

2. Uji statistik yang digunakan adalah uji F, dimana F hitung adalah:

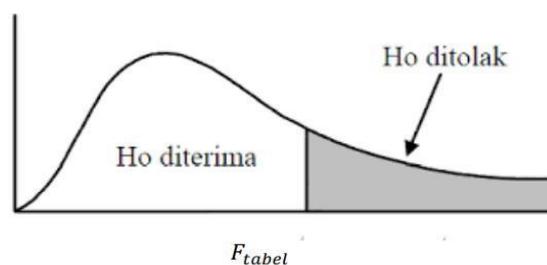
$$F = \frac{R^2 / k - 1}{(1 - R^2) / (n - k)} \dots \dots \dots (3.5)$$

Dimana: k = Jumlah parameter yang diestimasi

n = Jumlah data yang di observasi

Nilai F_{hitung} akan dibandingkan dengan $F_{tabel} = F(\alpha, n - k - 1)$ dengan derajat

kesalahan $\alpha = 10\%$



3. Kriteria Uji: Terima jika H_0 jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, hal lain tolak H_0 . Atau dalam distribusi kurva F dapat digambarkan sebagai berikut:

4 .Kesimpulan terima atau tolak H_0 : Memberikan kesimpulan sesuai kriteria uji maka terima H_0 .

d. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat dinyatakan dalam persentase. Namun tidak dapat dipungkiri ada kalanya dalam penggunaan koefisien determinasi (R^2) terjadi bias terhadap satu variabel bebas yang dimasukkan dalam model. Sebagai ukuran kesesuaian garis regresi dengan sebaran data, menghadapi masalah karena tidak memperhitungkan derajat bebas. Sebagai alternatif digunakan corrected atau adjusted R^2 (Kuncoro, 2018).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Batu Bara

Luas daratan Kabupaten Batu Bara adalah 904,96 km² , Sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil di Pulau Pandan dan Pulau Salah Nama. Secara astronomis Kabupaten Batu Bara terletak antara 2046' – 3026' LU dan 99005' – 99039' BT

Secara goeografis Kabupaten Batu Bara merupakan sebuah Kawasan di bahagian timur dari Provinsi Sumatera Utara tepatnya berbatasan dengan:

- Timur : berbatasan dengan Selat Malaka dan Kabupaten Asahan
- Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Asahan dan Kabupaten Simalungun
- Barat : berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai
- Utara : berbatasan dengan Selat Malaka

Wilayah Kabupaten Batu Bara adalah merupakan wilayah yang bertopografi relatif datar dan landai dengan ketinggian 0 – 80 m dpl (di atas permukaan laut). Wilayah ini terletak di tepi pantai pulau Sumatera (Sumatera Utara), merupakan daerah endapan yang dikenal sebagai daerah dataran rendah yang relatif datar, dimana seluruh wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, dengan panjang pantai ± 110 Km. Daerah ini sangat cocok untuk dimanfaatkan sebagai daerah pusat pemukiman, perkebunan, pertanian sawah, perdagangan, industry dan jasa.

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kabupaten Batu Bara

Kecamatan	Luas Wilayah	
	km ²	%
1. Sei Balai	92.64	10.24
2. Tanjung Tiram	173.79	19.2
3. Talawi	89.8	9.92
4. Lima Puluh	239.55	26.47
5. Air Putih	72.24	7.98
6. Sei Suka	171.47	18.95
7. Medang Deras	65.47	7.24
Batubara	904.96	100

sumber: <https://batubarakab.bps.go.id/>

Kabupaten Batubara memiliki 7 Kecamatan dimana luas daerah terbesar adalah Kecamatan Lima Puluh dengan luas 239,55 km² atau sekitar 26,47 persen dari total luas Batu Bara, diikuti Kecamatan Tanjung Tiram dengan luas 173,79 km² atau sekitar 19,20 persen, kemudian Kecamatan Sei Suka dengan luas 171,47 km² atau 18,95 persen. Sedangkan luas daerah terkecil adalah Kecamatan Medang Deras dengan luas 65,47 km² atau sekitar 7,24 persen dari total luas wilayah Batu Bara.

4.1.2 Kondisi Demografi Kabupaten Batu Bara

A. Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Batu Bara Tahun 2022 mencapai 416.367 jiwa sedangkan di tahun 2021 sebanyak 413.171 jiwa. didominasi oleh etnis melayu, kemudian diikuti oleh orang-orang Jawa, dan Suku Batak. Orang Mandailing merupakan sub-etnis Batak yang paling banyak bermukim disini. Etnis Jawa atau yang dikenal dengan *Pujakesuma* (Putra Jawa Kelahiran

Sumatra) mencapai 43% dari keseluruhan penduduk Batu Bara. Mereka merupakan keturunan kuli-kuli perkebunan yang dibawa para pekebun Eropa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.

Selain itu orang Minangkabau juga banyak ditemui di kabupaten ini. Sejak abad ke-18, Batu Bara telah menjadi pangkalan bagi orang-orang kaya Minangkabau yang melakukan perdagangan lintas selat. Mereka membawa hasil-hasil bumi dari pedalaman Sumatra, untuk dijual kepada orang-orang Eropa di Penang dan Singapura seperti halnya Pelalawan, Siak, dan Jambi; Batu Bara merupakan koloni dagang orang-orang Minang di pesisir timur Sumatra. Dari lima suku (klan) asli yang terdapat di Batu Bara yakni Lima Laras, Tanah Datar, Pesisir, Lima Puluh dan Suku Boga, dua di antaranya teridentifikasi sebagai nama *luhak* di Minangkabau, yang diperkirakan sebagai tempat asal masyarakat suku tersebut.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Batu Bara Tahun 2020

Kelompok Umur <i>Age Groups</i>	Jenis Kelamin <i>Gender</i>		Jumlah <i>Total</i>
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	
0 - 4	24 953	23 289	48 242
5-9	18 749	17 790	36 539
10-14	17 267	15 874	33 141
15 - 19	16 263	15 958	32 221
20 - 24	17 687	17 925	35 612
25 - 29	18 786	18 000	36 786
30 - 34	16 424	16 303	32 727
35 - 39	15 237	15 183	30 420
40 - 44	13 721	13 837	27 558
45 - 49	12 042	12 236	24 278
50 - 54	10 358	10 990	21 348
55 - 59	8 785	9 346	18 131
60 - 64	7 012	7 066	14 078
65 - 69	4 979	5 096	10 075
70 - 74	2 421	2 786	5 207
75+	1 867	2 448	4 315
Jumlah/Total	206 551	204 127	410 678

Sumber : Sensus Penduduk 2020

Dapat dilihat dari table 4.2 jumlah penduduk laki-laki lebih banyak sedikit ketimbang Perempuan dengan jumlah total 410.678 ribu jiwa.

B. Penduduk Usia Kerja dan Tenaga Kerja

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun keatas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Batu Bara. Pada usia ini, mereka memiliki potensi untuk masuk ke angkatan kerja dan pasar kerja. Penduduk usia kerja pada Agustus 2022 sebesar 310.301 orang, naik sebanyak 4.162 orang dibanding Agustus 2021. Sebagian besar penduduk usia kerja yaitu 73,50 persen atau 228.068 orang merupakan angkatan kerja, sisanya termasuk bukan angkatan kerja.



sumber : <https://batubarakab.bps.go.id/>

Gambar 4.1 Penduduk Usia kerja dan Tenaga Kerja Kabupaten Batu Bara Tahun 2019 sampai 2022.

4.1.3 Kondisi Ekonomi

A. Nilai Produk Domestik Regional Bruto

PDRB adalah Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah regional tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Tabel 4.3 PDRB Kabupaten Batu Bara ADHB (juta/milyar) Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022

Komponen pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
1. Konsumsi Rumah tangga	13.160.219,84	14.091.016,99	14.297.541,36	14.801.130,23	16.063.158,42
2. Konsumsi LNRT	258.159,92	287.567,13	285.496,65	281.858,83	301.044,40
3. Konsumsi Pemerintah	1.825.914,36	1.873.835,03	1.857.747,64	1.871.747,92	1.902.337,98
4. PMTB	6.230.014,89	6.683.979,07	6.834.351,33	7,263.687,51	7.747.533,01
5. Perubahan Inventori	589.542,17	624.710,94	850.156,81	870,643,94	978.459,86
6. Net Ekspor	9.908.153,53	10.486.739,86	10.862.194,01	12.108.645,16	13.884.182,58
Total PDRB	31.972.004,73	34.047.849,02	34.987.641,80	37.197.713,59	40.866.716,26

sumber : <https://batubarakab.bps.go.id/>

Pada periode tahun 2018 – 2022, PDRB Kabupaten Batu Bara Atas Dasar Harga Berlaku cenderung mengalami peningkatan, yakni sebesar 31.972,00 miliar Rupiah (2018); 34.047,85 miliar Rupiah (2019); 34.987,64 miliar Rupiah (2020); 37.197,71 miliar Rupiah (2021) dan 40.866,72 miliar Rupiah (2022). Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume.

Tabel 4.4 PDRB Kabupaten Batu Bara ADHK (juta/milyar) 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2018- 2022

Komponen pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
1. Konsumsi Rumah tangga	9.016.172,65	9.363.733,67	9.365.559,64	9.542.900,77	9.887.828,25
2. Konsumsi LNRT	191.193,01	211.742,79	206.809,18	202.185,47	209.966,76
3. Konsumsi Pemerintah	1.198.386,56	1.208.370,38	1.206.027,90	1.202.062,92	1.200.139,62
4. PMTB	4.105.028,68	4.419.923,90	4.417.944,28	4.548.997,61	4.710.735,44
5. Perubahan Inventori	462.893,29	487.318,20	639.845,16	629.316,77	657.111,59
6. Net Ekspor	8.024.923,10	8.307.504,12	8.087.458,43	8.360.592,16	8.816.429,23
Total PDRB	22.998.597,30	23.998.593,06	23.923.644,60	24.486.055,71	25.482.210,89

sumber : <https://batubarakab.bps.go.id/>

Dari tabel 4.4 , terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Konstan di Kabupaten Batu Bara meningkat pada periode 2018-2022, yakni sebesar 22.998,60 miliar Rupiah (2018); 23.998,59 miliar Rupiah (2019); 23.923,64 miliar Rupiah (2020); 24.486,05 miliar Rupiah (2021) dan mengalami peningkatan pada 2022 yakni 25.482,21 miliar Rupiah.

**Tabel 4.5 Sumber Pertumbuhan PDRB (persen) Kabupaten Batu Bara
Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022**

Komponen pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
1. Konsumsi Rumah tangga	2,28	2,51	0,01	0,74	1,41
2. Konsumsi LNRT	0,06	0,09	-0,02	0,02	0,03
3. Konsumsi Pemerintah	0,38	0,04	-0,01	0,02	0,01
4. PMTB	1,48	1,37	-0,01	0,55	0,66
5. Perubahan Inventori	0,18	0,11	0,64	0,04	0,11
6. Net Ekspor	0,00	1,23	-0,92	1,14	1,86
Total PDRB	4,28	4,35	-0,31	2,35	4,07

sumber : <https://batubarakab.bps.go.id/>

Bila dilihat dari penciptaan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batubara selama dua tahun terakhir, khususnya setelah kontraksi saat pandemi Covid-19, komponen net ekspor dan konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi tertinggi pada capaian nilai pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran.

**Tabel 4.6 PDRB dan PDRB Perkapita Kabupaten Batu Bara Tahun 2018—
2022**

<i>Uraian/Description</i>	2018	2019	2020	2021 ^(*)	2022 ^(*)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
Nilai PDRB/GRDP (Juta Rp/Million Rp)					
- ADHB/ <i>at Current Prices</i>	31 972 004,73	34 047 849,02	34 987 641,80	37 197 713,59	40 866 716,26
- ADHK 2010/ <i>at 2010 Constant Prices</i>	22 998 597,30	23 998 593,06	23 923 644,60	24 486 055,71	25 482 210,89
PDRB perkapita / Per Capita GRDP (Ribu Rp/Thousand Rp)					
- ADHB/ <i>at Current Prices</i>	77 415,55	81 396,93	85 362,15	90 029,83	98 150,71
- ADHK 2010/ <i>at 2010 Constant Prices</i>	55 687,75	57 372,55	58 368,43	59 263,73	61 201,32
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010/ Growth of Per Capita GRDP at 2010 Constant Prices	3,39	3,03	1,74	1,53	3,27
Jumlah Penduduk/Population (org/People)	412 992	418 294	409 873	413 171	416 367
Pertumbuhan/ Growth (%)	0,95	0,85	0,86	0,79	0,75

sumber : <https://batubarakab.bps.go.id/>

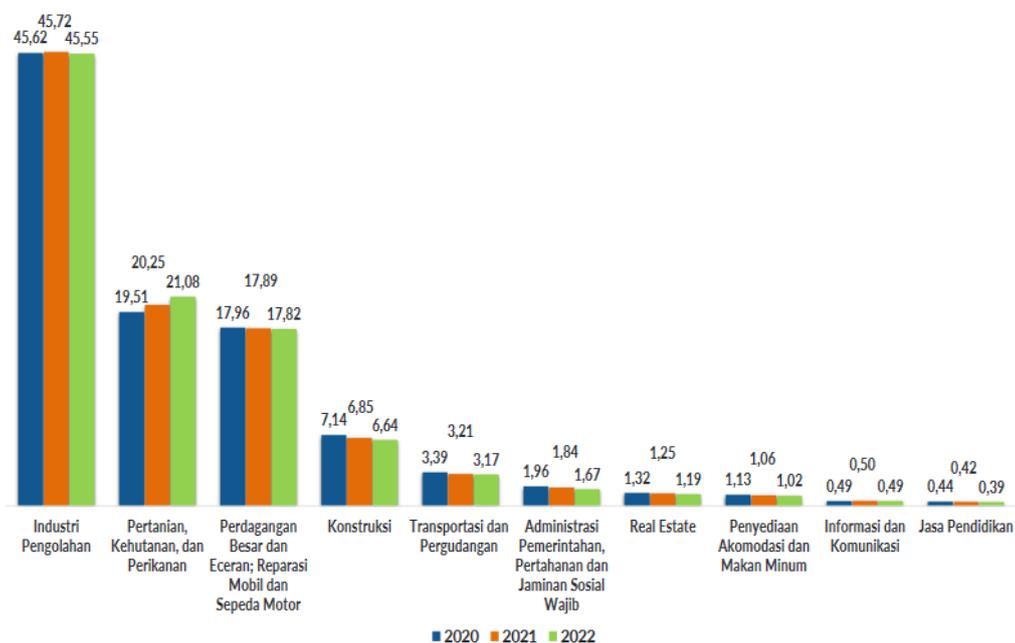
PDRB perkapita Kabupaten Batu Bara menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seperti yang disajikan pada tabel 4.6, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Batu Bara rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut. Peningkatan PDRB perkapita merupakan indikator yang paling kasar yang dapat menunjukkan kesejahteraan penduduk.

Pertumbuhan PDRB perkapita secara “riil” menurun secara perlahan selama kurun waktu 2018-2021, namun pada tahun 2022 mengalami peningkatan. Tahun 2022, PDRB perkapita meningkat sebesar 3,27 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 1,53 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 salah satunya disebabkan adanya Covid-19 yang mempengaruhi hampir diseluruh sektor perekonomian sehingga PDRB mengalami penurunan. Pada tahun

2018-2019, PDRB per kapita mampu tumbuh dikisaran 3 persen. Namun karena adanya pandemi Covid-19 pertumbuhan per kapita pada tahun 2020- 2021 berturut-turut mengalami penurunan. Pada tahun 2022 mulai tumbuh menaik secara perlahan menjadi 3,27 persen.

B. Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian Kabupaten Batu Bara pada tahun 2022 masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu Industri Pengolahan sebesar 45,55 persen; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 21,08 persen; serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17,82 persen. Peranan ke tiga lapangan usaha tersebut mencapai 84,45 persen terhadap total PDRB Kabupaten Batu Bara.

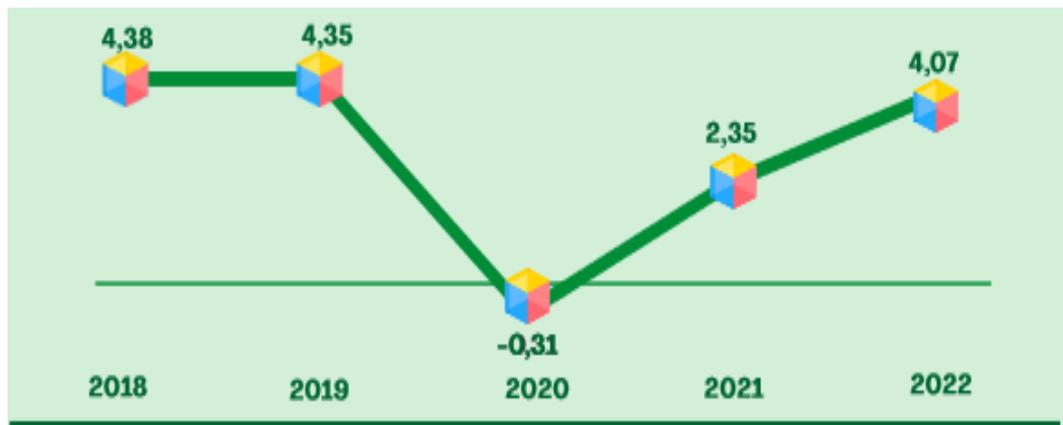


sumber : <https://batubarakab.bps.go.id>

Gambar 4.2 Struktur PDRB beberapa lapangan usaha

C. Pertumbuhan Ekonomi

Berikut laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Batu Bara Tahun 2018 sampai 2022



sumber: <https://batubarakab.bps.go.id>

Gambar 4.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batu Bara Tahun 2018 sampai 2022

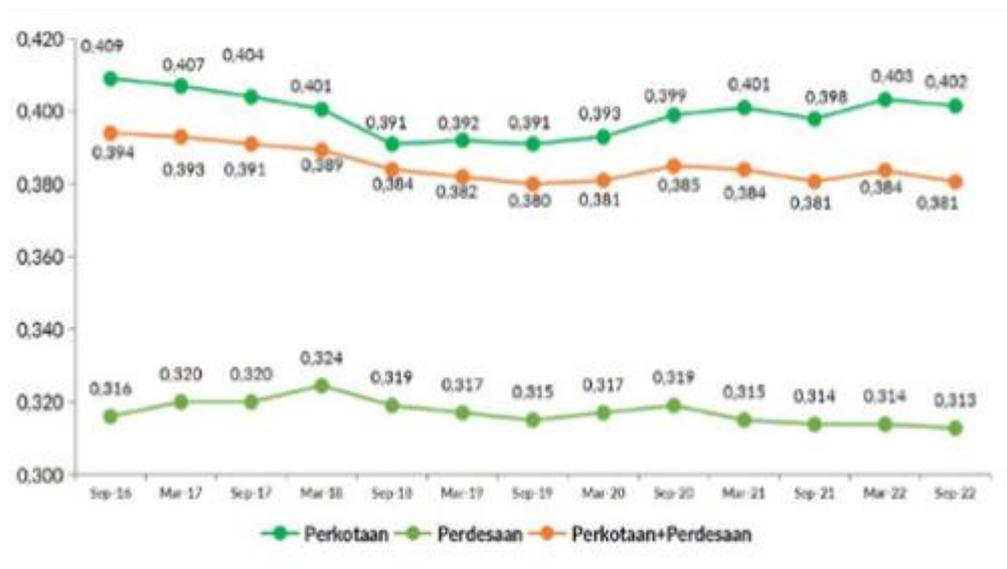
Perekonomian Kabupaten Batu Bara di Tahun 2020 mengalami penurunan dari Tahun 2019 hal ini disebabkan adanya virus covid-19 yang melanda sehingga aktifitas warga sangat dibatasi. Namun masuk di Tahun 2021 perekonomian Kabupaten Batu Bara mengalami kenaikan sebesar 2,04% hingga sampai Tahun 2022 Perekonomian kabupaten Batu Bara stabil dengan meningkatnya menjadi 4,07%.

Tabel 4.7 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Kabupaten Batu Bara Menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan 2010			Sumber Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010		
	2020'	2021*	2022**	2020'	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,19	4,80	6,24	0,69	1,08	1,44
B. Pertambangan dan Penggalian	-0,28	0,56	4,62	-0,00	0,00	0,01
C. Industri Pengolahan	-1,85	1,42	2,67	-0,85	0,64	1,20
D. Pengadaan Listrik dan Gas	5,53	3,39	3,47	0,00	0,00	0,00
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,31	2,31	0,36	-0,00	0,00	0,00
F. Konstruksi	-4,41	0,05	0,90	-0,29	0,00	0,06
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,50	3,60	6,52	0,24	0,59	1,08
H. Transportasi dan Pergudangan	-3,24	-0,57	3,97	-0,11	-0,02	0,13
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-5,75	-0,03	4,39	-0,07	-0,00	0,05
J. Informasi dan Komunikasi	7,47	7,04	4,56	0,05	0,05	0,03
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,38	2,91	4,06	0,00	0,01	0,01
L. Real Estate	1,66	0,28	2,56	0,02	0,00	0,03
M,N. Jasa Perusahaan	0,33	-0,31	3,67	0,00	-0,00	0,00
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,32	-0,47	-0,08	-0,01	-0,01	-0,00
P. Jasa Pendidikan	3,28	1,01	3,02	0,01	0,00	0,01
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-0,60	-1,01	5,53	-0,00	-0,00	0,02
R,S,T,U. Jasa lainnya	-0,47	2,18	7,40	-0,00	0,00	0,01
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	-0,31	2,35	4,07	-0,31	2,35	4,07

sumber: <https://batubarakab.bps.go.id>

D. Gini Ratio



sumber: <https://www.bps.go.id>

Gambar 4.4 Perkembangan Gini Ratio September 2016-september 2022

Secara nasional, sejak September 2016, angka Gini Ratio terus mengalami penurunan sampai dengan September 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran rumah tangga di Indonesia. Namun demikian, pada masa pandemi Covid-19, angka Gini Ratio mengalami kenaikan pada Maret 2020 dan September 2020. Setelah kembali mengalami penurunan pada Maret 2021 hingga September 2021, angka Gini Ratio meningkat lagi menjadi 0,384 pada Maret 2022. Namun, pada September 2022, angka Gini Ratio berhasil menurun kembali menjadi 0,381.

Jika dilihat berdasarkan daerah, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2022 adalah sebesar 0,402. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan sebesar 0,001 poin dibanding Maret 2022 yang sebesar 0,403 dan kenaikan 0,004 poin dibanding kondisi September 2021 yang sebesar 0,398. Sementara itu, Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2022 tercatat sebesar 0,313; terjadi

penurunan sebesar 0,001 poin dari kondisi Maret 2022 dan September 2021 yang sebesar 0,314.

E. Pengangguran

Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan pekerjaan. Umumnya, penyebab pengangguran adalah ketidakseimbangan laju pertumbuhan penduduk dengan lapangan kerja yang tersedia. Artinya, jumlah tenaga kerja lebih banyak dari jumlah lapangan kerja.

Tabel 4.8 Jumlah Pengangguran dan Tingkat Peangguran Terbuka Berumur 15 Tahun ke Atas dari Tahun 2020 sampai 2022

Tahun	Jumlah Pengangguran berumur 15 Tahun keatas (jiwa)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) penduduk umur 15 tahun ke atas (%)
2020	13.521	6,48
2021	14.177	6,62
2022	25.856	6,21

Sumber: <https://sumut.bps.go.id>

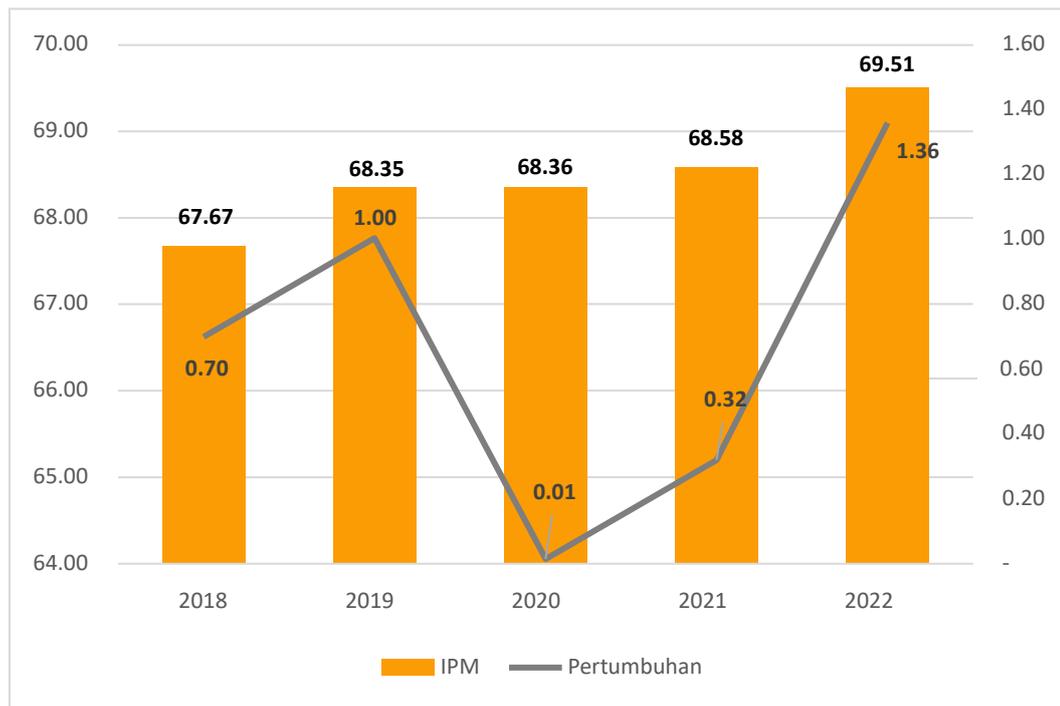
Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pengangguran berumur 15 tahun keatas dari tahun 2020 sampai 2022 terus mengalami kenaikan, puncaknya di tahun 2022 dengan banyak pengangguran sebanyak 25.856 jiwa.

4.1.4 Kondisi Sosial

A. Indeks Pembangunan manusia

Pembangunan manusia telah memberikan pemahaman baru terhadap sudut pandang pembangunan yang lebih luas. Perkemangan manusia secara umum

menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. IPM Batu Bara tahun 2018 sebesar 67,67 terus meningkat menjadi 69,51 pada tahun 2022. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa selama periode 5 tahun terakhir, IPM Batu Bara terus tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,68 persen.



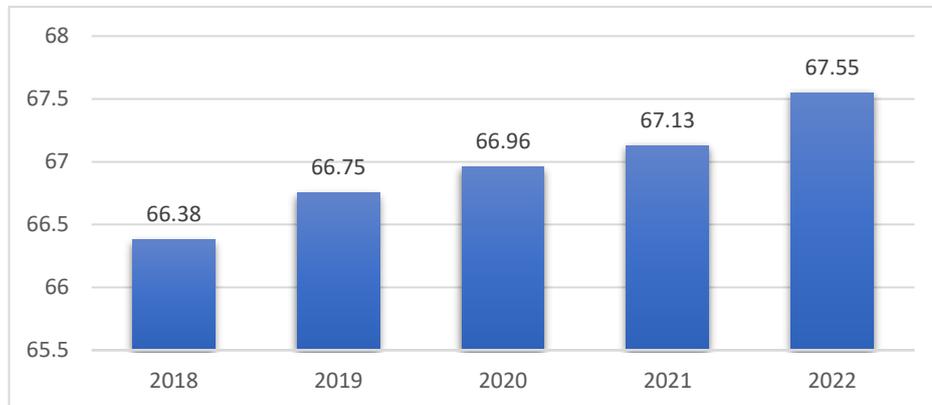
Sumber: <https://batubarakab.bps.go.id>

Gambar 4.5 Perkembangan IPM Kabupaten Batu Bara

1) Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup menjadi salah satu indikator gambaran Kesehatan masyarakat yang sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan di bidang kesehatan. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. AHH dapat menggambarkan tingkat kesehatan yang telah dicapai oleh masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesehatan masyarakat, diharapkan kesempatan untuk bertahan hidup akan semakin besar. Sebaliknya, tingkat kesehatan yang buruk akan cenderung

memperpendek usia hidup. Angka harapan hidup berbanding terbalik dengan tingkat kematian bayi, artinya semakin rendah angka kematian bayi maka angka harapan hidup akan semakin tinggi, demikian pula sebaliknya.



sumber:

<https://batubarakab.bps.go.id>

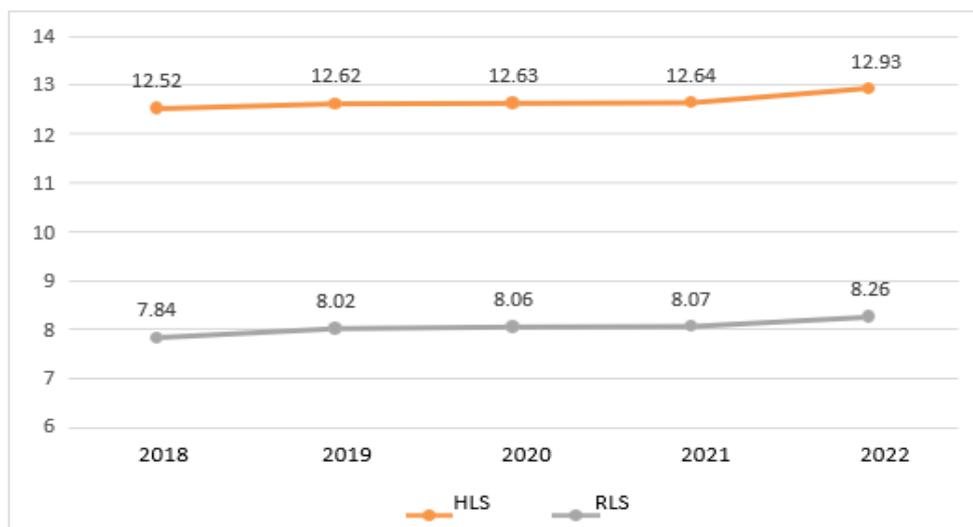
Gambar 4.6 Perkembangan Angka Harapan Hidup Batu Bara, 2018-2022

Gambar 4.6 memperlihatkan perkembangan AHH Batu Bara selama kurun waktu lima tahun terakhir. Pada gambar tersebut terlihat bahwa AHH Batu Bara selama periode 2018-2022 menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten. Artinya, harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin bertambah. AHH Batu Bara pada tahun 2022 mencapai 67,55 tahun. Berarti setiap bayi di Batu Bara yang dilahirkan pada tahun 2022, dapat berharap untuk hidup sampai usia 67 sampai 68 tahun. Selama tahun 2018-2022, angka harapan hidup saat lahir di Batu Bara tumbuh rata-rata 0,62 persen per tahun.

2) Rata Rata Lama Sekolah

Tingkat pendidikan mempunyai hubungan yang kuat dengan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga maupun masyarakat. Pada dasarnya pembangunan pendidikan difokuskan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam pendidikan dan memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik muda maupun tua di setiap jenjang Pendidikan utamanya hingga SLTA, serta untuk meningkatkan mutu dan relevansi Pendidikan dengan perkembangan dunia usaha. Peningkatan partisipasi masyarakat ini, bisa dilihat dari peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) serta Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk, yang keberhasilannya memerlukan dukungan keluarga, masyarakat luas dan pemerintah.



sumber: <https://batubarakab.bps.go.id>

Gambar 4.7 Perkembangan HLS dan RLS Kabupaten Batu Bara, 2018-2022

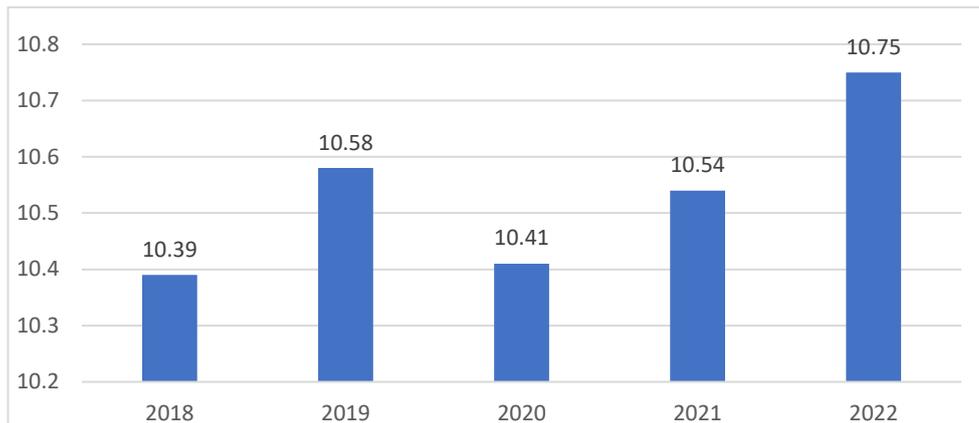
Sampai dengan tahun 2022, rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas di Batu Bara telah mencapai 8,26 tahun atau setara dengan SLTP kelas 2. Sementara anak usia 7 tahun yang masuk dunia pendidikan diharapkan akan dapat

bersekolah selama 12,93 tahun atau mencapai Diploma I. Perkembangan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Batu Bara selama lima tahun terakhir secara umum terus meningkat.

Pada tahun 2018, HLS di Batu Bara sebesar 12,52 tahun secara konsisten terus meningkat menjadi 12,93 tahun pada tahun 2022. Demikian juga dengan RLS, pada tahun 2018 sebesar 7,84 tahun meningkat hingga 8,26 tahun pada tahun 2022. Rata-rata pertumbuhan RLS dalam lima tahun terakhir sebesar 1,08 persen, lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan HLS yang tumbuh 0,70 persen.

3) Kemampuan Daya Beli

Daya beli masyarakat mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Kemampuan ini berbeda antar wilayah, karena nilai tukar antar wilayah juga berbeda bergantung kepada harga riil pada masing-masing wilayah. Agar kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah menjadi terbanding, perlu dibuat standarisasi. Misalnya, satu rupiah di suatu wilayah memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta Selatan. Dengan adanya standarisasi ini, maka perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah dapat dibandingkan.



sumber: <https://batubarakab.bps.go.id>

Gambar 4.8 Perkembangan Pengeluaran per kapita Kabupaten Batu Bara Tahun 2018 sampai 2022

Tahun 2022, pengeluaran per kapita penduduk Batu Bara telah mencapai 10,75 juta per tahun. Pada Tahun 2018 tingkat daya beli masyarakat Batu Bara sebesar 10,39 juta rupiah perkapita pertahun, sehingga kemampuan daya beli masyarakat Batu Bara selama periode 2018-2022 rata-rata pertumbuhan sekitar 1,31 persen per tahun. Tahun 2021 mengalami pertumbuhan 1,25 persen, dan kembali mengalami pertumbuhan pada tahun 2022 sebesar 1,99 persen.

1. Kemiskinan di Kabupaten Batu Bara

Berikut ini angka kemiskinan di Kabupaten Batu Bara Tahun 2018-2022

Tabel 4.9 Angka Kemiskinan Kabupaten Batu Bara

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Garis Kemiskinan (Rp)	381.651	408.417	452.393	477.564	508.524
Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	51,78	50,46	49,78	52,59	49,39
Penduduk Miskin (%)	12,57	12,14	11,88	12,38	11,53

sumber: <https://batubarakab.bps.go.id>

Angka garis kemiskinan di Batu Bara tahun 2022 sebesar Rp. 508.524 yang artinya seseorang dikatakan hidup layak jika pengeluaran makanan dan non makanannya mencapai Rp. 508.524 per bulan. Persentase penduduk miskin pada tahun 2022 sebesar 11,53 persen, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 12,38.

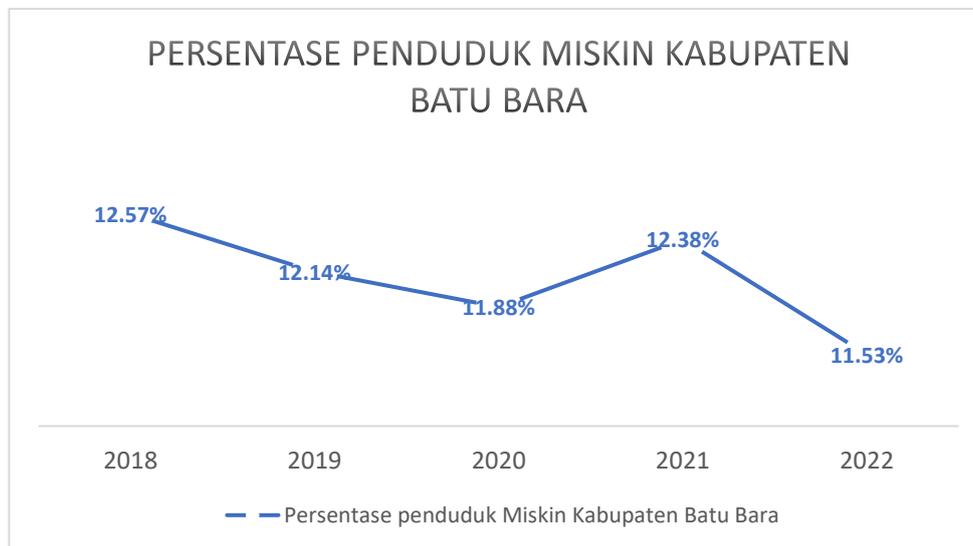
4.2 Analisa Pembahasan Tujuan

4.2.1. Melakukan analisa ekonomi secara deskriptif tentang perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Batu Bara

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar Kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara juga peduli terhadap kemiskinan yang terjadi di wilayahnya. Hal itu tercermin dari beberapa butir misi kepemimpinannya, yaitu meningkatkan infrastruktur yang dapat mendukung industri dan perekonomian rakyat, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Disamping itu, pada bulan Mei 2021 yang lalu Bupati juga merumuskan Peraturan Bupati (Perbub) Batu Bara, Nomor 55 Tahun 2021, tentang Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan, guna meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan di

tengah masyarakat Batu Bara. Dengan demikian telah terbentuk integrasi penanganan kemiskinan dari level pemerintah pusat dan kabupaten dalam menanggulangi kemiskinan.



sumber: <https://batubarakab.bps.go.id>

Gambar 4.9 Perkembangan Kemsikinan di Kabupaten Batu Bara.

Dapat dilihat dari gambar diatas kemiskinan di Kabupaten Batu Bara di Tahun 2018 jumlah penduduk miskin sebesar 51,78 juta jiwa dengan tingkat persentase 12,57%, jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 50,46 juta jiwa dengan tingkat persentase 12,14%, pada tahun 2020 juga mengalami penurun menjadi 49,78 juta jiwa dengan tingkat persentase 11,88%, pada tahun 2021 jumlah kemiskinan di kabupaten batubara mengalami kenaikan yang cukup tinggi menjadi 52,59 juta jiwa dengan tingkat persentase 12,38%, ini bisa di bilang di akibatkan karena adanya covid 19 yang melanda dunia sehingga banyaknya kegiatan yang di batasi oleh pemerintah agar tidak terlalu menyebar virus covid 19, dan di tahun 2022 jumlah kemiskinan yang ada di kabupaten batubara Kembali mengalami penurunan menjadi 49,39 juta jiwa dengan

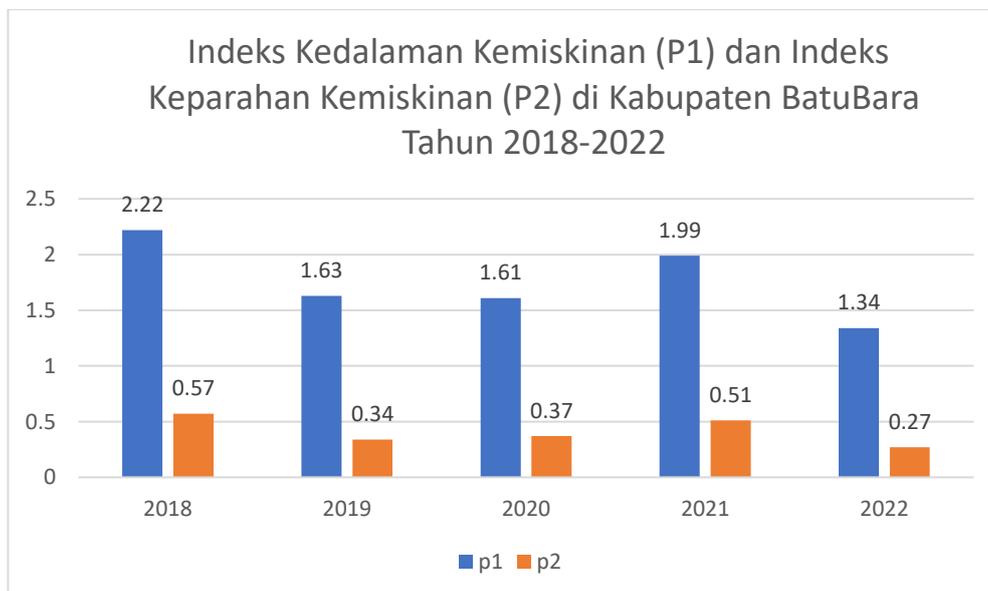
tingkat persentase 11,53%. Persentase ini menunjukkan bahwa perkembangan penduduk miskin di kabupaten batubara tahun 2018-2022 mengalami penurunan yang cukup baik, sempat terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin di batubara tahun 2020 karena adanya virus covid 19.

A. Garis Kemiskinan, Indeks kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Garis kemiskinan merupakan batas yang digunakan untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa penduduk miskin adalah penduduk yang rata-rata pengeluarannya per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Kondisi garis kemiskinan Kabupaten Batu Bara dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan sekitar 6,4 persen, yaitu Rp 477.564 menjadi Rp 508.524. sedangkan di Tahun 2018 garis kemiskinan Kabupaten Batu Bara sebesar Rp 381.651 naik menjadi Rp 452.393 di Tahun 2020. Ini menunjukkan perkembangan yang sangat baik, pemerintah Kabupaten Batu Bara mampu untuk mengurangi Kemiskinan.

Apabila mengkaitkan kenaikan garis kemiskinan dengan penurunan persentase penduduk miskin dari tahun 2021 ke tahun 2022, maka dapat dikatakan bahwa pendapatan per kapita penduduk Batu Bara rata-rata mengalami kenaikan, hal tersebut juga didukung dengan terjadinya tren penurunan indeks gini rasio di Kabupten Batu Bara. Jika berbicara tentang kemiskinan maka persoalannya tidak hanya sebatas berapa jumlah penduduk miskin saja. Aspek lain yang juga penting diperhatikan dari kemiskinan/penduduk miskin adalah indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2).

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan indikator yang berfungsi untuk menunjukkan seberapa besar rata-rata selisih pengeluaran per kapita penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Dengan kata lain semakin tinggi indeks P1 menunjukkan kondisi bahwa penduduk miskin menjadi semakin miskin karena jarak atau rentang pengeluaran per kapita penduduk miskin terhadap garis kemiskinan menjadi semakin jauh. Sedangkan Indeks keparahan kemiskinan merupakan indikator yang berfungsi untuk menunjukkan rata-rata dari kuadrat selisih pengeluaran per kapita penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Dengan kata lain, semakin tinggi indeks P2 menunjukkan semakin miskinnya penduduk paling miskin akibat bobot yang lebih tinggi yang diterapkan oleh pengkuadratan selisih pengeluaran per kapita.



sumber: <https://batubarakab.bps.go.id/>

Gambar 4.10 Indeks Kedalaman dan Keparahannya Kemiskinan

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2022

indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Batu Bara mengalami penurunan sebesar 0,65 poin dari tahun sebelumnya, menjadi sebesar 1,34. Penurunan P1 tersebut memberi arti bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan jaraknya semakin mendekat, dengan demikian ditarik kesimpulan bahwa pada tahun 2022 kedalaman kemiskinan penduduk Kabupaten Batu Bara berkurang.

Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Batu Bara juga mengalami penurunan sekitar 0,24 poin dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 0,27. Penurunan P2 tersebut memberi arti bahwa ketimpangan pendapatan antara penduduk miskin yang satu dengan penduduk miskin yang lainnya semakin menurun.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji multikolinieritas

Variance Inflation Factors
Date: 08/21/23 Time: 22:26
Sample: 2017S1 2022S2
Included observations: 12

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	19.85976	2.45E+09	NA
DAU	0.016544	4.47E+08	6.668053
DAK	0.001004	26970205	5.347995
DBH	0.018774	4.99E+08	57.14744
DD	0.217899	5.84E+09	129.3790
PDRBKAP	0.039208	1.00E+09	143.5769
TPAK	0.000184	2808324.	40.19868

Sumber: eviws 12 diolah

Gambar 4.11 Uji Multikolinieritas

Dapat dilihat dari gambar di atas diketahui nilai VIF pada variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) <10,00 maka bisa di

simpulkan variabel DAU dan DAK terbebas dari multikolinieritas. Sedangkan pada Variabel Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Desa (DD), Produk Domestik Regional Bruto perkapita (PDRB) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) nilai VIF nya $>10,00$ maka variabel tersebut tidak lolos uji multikolinieritas. Namun setelah di buang 1 variabel, yaitu variabel Dana Desa (DD) tidak terjadi multikolinieritas atau lolos uji multikolinieritas. Bisa dilihat pada gambar berikut.

Variance Inflation Factors
Date: 08/23/23 Time: 00:00
Sample: 2017S1 2022S2
Included observations: 12

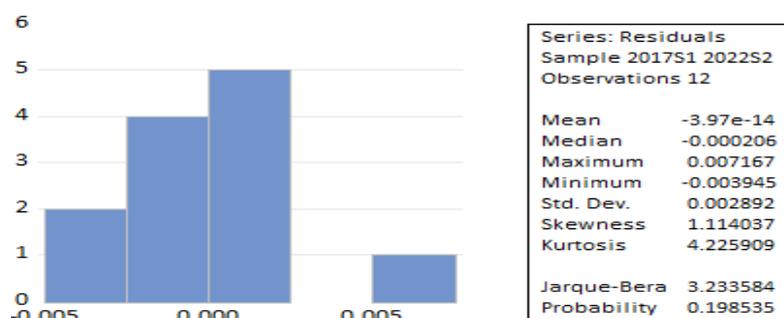
Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	246.1152	1.93E+08	NA
DAU	0.738282	1.27E+08	1.890053
DAK	0.093531	15962035	3.165156
DBH	0.072508	12250998	1.401908
PDRBKAP	0.124234	20214363	2.889694
TPAK	0.003594	348956.7	4.995008

Sumber: evIEWS 12 diolah

Gambar 4.12 Uji Multikolinieritas sesudah menghilangkan 1 variabel

Dapat dilihat dari gambar di atas nilai VIF di semua variabel $<10,00$, maka data tersebut lolos uji multikolinieritas.

2. Uji Normalitas



Sumber: evIEWS 12 diolah

Gambar 4.13 Uji Normalitas

Diketahui nilai probability nya sebesar 0,198535 ($>0,05$), maka bisa di simpulkan bahwa data berdistribusi normal atau lolos uji normalitas.

3. Uji Heterokedastitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.899150	Prob. F(5,6)	0.2287
Obs*R-squared	7.353564	Prob. Chi-Square(5)	0.1956
Scaled explained SS	2.965241	Prob. Chi-Square(5)	0.7053

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 08/23/23 Time: 00:11
Sample: 2017S1 2022S2
Included observations: 12

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.020063	0.048540	0.413338	0.6937
DAU	-0.003908	0.002659	-1.469904	0.1920
DAK	0.000791	0.000946	0.835632	0.4354
DBH	0.000401	0.000833	0.481246	0.6474
PDRBKAP	0.001609	0.001091	1.475011	0.1907
TPAK	-0.000263	0.000185	-1.415921	0.2066
R-squared	0.612797	Mean dependent var	7.66E-06	
Adjusted R-squared	0.290128	S.D. dependent var	1.44E-05	
S.E. of regression	1.21E-05	Akaike info criterion	-19.49761	
Sum squared resid	8.80E-10	Schwarz criterion	-19.25516	
Log likelihood	122.9857	Hannan-Quinn criter.	-19.58738	
F-statistic	1.899150	Durbin-Watson stat	2.789152	
Prob(F-statistic)	0.228662			

Sumber: eviews 12 diolah

Gambar 4.14 Uji Heteroskedastisitas

Dilihat dari gambar di atas, diketahui nilai Obs*R-squared 0,1956 ($>0,05$) maka bisa disimpulkan bahwa uji heterokedastitas sudah terpenuhi atau sudah lolos uji heterokedastitas.

4. Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 1 lag

F-statistic	4.478590	Prob. F(1,5)	0.0879
Obs*R-squared	5.669945	Prob. Chi-Square(1)	0.0173

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 08/25/23 Time: 17:59

Sample: 2017S1 2022S2

Included observations: 12

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-7.405537	12.96293	-0.571286	0.5925
DAU	0.343989	0.702679	0.489540	0.6452
DAK	0.232469	0.266969	0.870770	0.4237
DBH	0.061316	0.216189	0.283623	0.7881
PDRBKAP	-0.160542	0.290510	-0.552621	0.6043
TPAK	0.026192	0.049278	0.531520	0.6178
RESID(-1)	-1.028613	0.486050	-2.116268	0.0879
R-squared	0.472495	Mean dependent var	-3.97E-14	
Adjusted R-squared	-0.160510	S.D. dependent var	0.002892	
S.E. of regression	0.003115	Akaike info criterion	-8.414004	
Sum squared resid	4.85E-05	Schwarz criterion	-8.131142	
Log likelihood	57.48402	Hannan-Quinn criter.	-8.518730	
F-statistic	0.746432	Durbin-Watson stat	2.927419	
Prob(F-statistic)	0.638224			

Sumber: *evIEWS 12 diolah*

Gambar 4.15 Uji Autokorelasi

Pada hasil uji autokorelasi di atas, dapat dilihat dengan nilai *obs*R-squared* sebesar 0,0173 atau $<0,05$ maka bisa disimpulkan telah terjadi autokorelasi. Namun ketika 1 variabel dihilangkan yaitu variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) nya tidak terjadi autokorelasi atau lolos uji autokorelasi. Dapat dilihat dari gambar berikut

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 1 lag

F-statistic	0.652343	Prob. F(1,6)	0.4501
Obs*R-squared	1.176746	Prob. Chi-Square(1)	0.2780

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 08/25/23 Time: 18:00

Sample: 2017S1 2022S2

Included observations: 12

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-13.11243	39.47377	-0.332181	0.7511
DAU	0.798411	2.137873	0.373461	0.7216
DAK	0.201585	0.672660	0.299683	0.7745
DBH	-0.041767	0.565998	-0.073793	0.9436
PDRBKAP	-0.074737	0.728515	-0.102588	0.9216
RESID(-1)	0.375643	0.465091	0.807678	0.4501
R-squared	0.098062	Mean dependent var	-2.01E-14	
Adjusted R-squared	-0.653553	S.D. dependent var	0.007024	
S.E. of regression	0.009033	Akaike info criterion	-6.269059	
Sum squared resid	0.000490	Schwarz criterion	-6.026606	
Log likelihood	43.61436	Hannan-Quinn criter.	-6.358824	
F-statistic	0.130469	Durbin-Watson stat	1.557282	
Prob(F-statistic)	0.979481			

*Sumber eviews 12 diolah***Gambar 4.16 Uji Autokorelasi setelah di hilangkan 1 variabel**

Gambar di atas setelah dilakukannya pengurangan variabel yaitu variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), diketahui nilai obs*R-squared sebesar 0,2780 atau $>0,05$ maka bisa disimpulkan tidak ada autokorelasi atau lolos dari uji autokorelasi.

Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik, maka tidak terjadi dari multikolinieritas, normalitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi, artinya bahwa hasil regresi linier dikatakan lolos dari uji asumsi klasik.

4.2.3 Hasil Regresi Berganda

A. Model Estimasi

Model ekonometrika pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

$$\log K_t = \beta_0 + \beta_1 \log \text{DAU}_t + \beta_2 \log \text{DAK}_t + \beta_3 \log \text{DBH}_t + \beta_4 \log \text{PDRBkap} + \varepsilon$$

Selanjutnya model tersebut akan di estimasi untuk memperoleh nilai dan besaran masing-masing parameter dalam model persamaan tersebut. Dibawah ini merupakan hasil analisis regresi. Regresi dilakukan dengan variabel independennya yaitu, DAU, DAK, DBH, dan PDRBkap. Menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan program *Eviews 12* berikut ini adalah hasil running data yang telah diolah :

Dependent Variable: KEMISKINAN
 Method: Least Squares
 Date: 08/25/23 Time: 18:00
 Sample: 2017S1 2022S2
 Included observations: 12

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	272.0038	35.07585	7.754732	0.0001
DAU	-10.64848	1.847933	-5.762375	0.0007
DAK	-4.674617	0.608933	-7.676729	0.0001
DBH	0.360428	0.549456	0.655972	0.5328
PDRBKAP	-2.533945	0.704441	-3.597099	0.0088

R-squared	0.959806	Mean dependent var	14.01080
Adjusted R-squared	0.936838	S.D. dependent var	0.035037
S.E. of regression	0.008806	Akaike info criterion	-6.332516
Sum squared resid	0.000543	Schwarz criterion	-6.130472
Log likelihood	42.99510	Hannan-Quinn criter.	-6.407320
F-statistic	41.78897	Durbin-Watson stat	1.378706
Prob(F-statistic)	0.000057		

Sumber: *eviews 12 diolah*

Gambar 4.17 Regresi Berganda

B. Tahapan Analisis

1. Analisa Persamaan Regresi

$$272,003-10,648(\text{DAU})-4,674(\text{DAK})+0,360(\text{DBH})-2,533(\text{PDRBKAP})$$

- Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 272,003 maka bisa diartikan bahwa jika variabel independent naik satu satuan secara rerata, maka variable dependen akan naik sebesar 272,003.
- Nilai koefisien Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar -10,648, maka bisa diartikan bahwa jika variable Dana Alokasi Umum (DAU) meningkat maka Kemiskinan akan menurun sebesar -10,648.
- Nilai koefisien Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar -4,674, maka bisa diartikan bahwa jika Dana Alokasi Khusus (DAK) meningkat maka Kemiskinan akan menurun sebesar -4,674.
- Nilai koefisien Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 0,360, maka bisa diartikan bahwa jika Dana Bagi Hasil (DBH) meningkat maka Kemiskinan juga ikut meningkat sebesar 0,360.
- Nilai koefisien Produk Domestik Regional Bruto perkapita (PDRBKAP) - 2,533, maka bisa diartikan bahwa jika Produk Domestik Regional Bruto naik maka kemiskinan akan menurun sebesar -2,533.

2. Uji Parsial (Uji t-statistik)

Untuk menguji bagaimana pengaruh dari masing- masing variable bebas DAU, DAK, DBH, dan PDRBkap terhadap Kemiskinan di Kabupaten Batu Bara dapat dilihat sebagai berikut.

1) Hipotesis

H_0 : DAU \rightarrow Kemiskinan = 0 (tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Kemiskinan di Kabupaten Batu Bara)

H_a : DAU \rightarrow Kemiskinan \neq 0 (ada hubungan yang signifikan antara Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Kemiskinan di Kabupaten Batu Bara)

2) Uji Statistik

$$t_h = \beta_1 / S_{\beta_1}$$

$$t_h = -10,64848 / 1,847933 = -5,762375$$

Dibandingkan dengan t.tabel sebagai berikut:

$$T \text{ table} = \pm t (\alpha/2 , n-k-1)$$

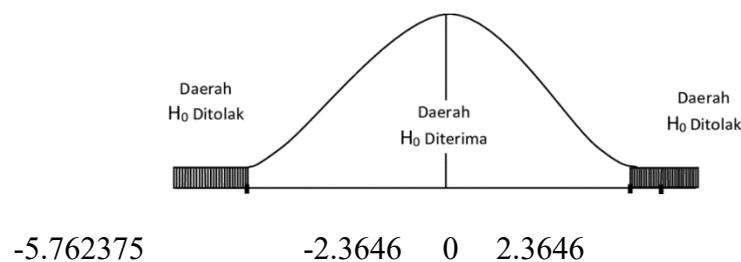
$$= \pm t (10\% / 2, 12 - 4 - 1)$$

$$= \pm t (5\%, 7)$$

$$= \pm 2.3646$$

3) Kriteria Uji

Pada variabel ini menggunakan menggunakan nilai α 5% memiliki nilai *t-statistic* -5.762375 dengan nilai t-tabel 2.3646. hal ini membuktikan bahwa hipotesis H_0 ditolak dan artinya Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh dan signifikan terhadap Kemiskinan, dapat dilihat juga pada tabel distribusi berikut:



Gambar 4.18 Kurva Distribusi Normal Uji t Variabel DAU

4) Kesimpulan

Dari hasil regresi menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan di Kabupaten Batu Bara. Karena semakin besar penerimaan Dana Alokasi Umum maka akan mengurangi Tingkat angka Kemiskinan

1) Hipotesis

H_0 : DAK \rightarrow Kemiskinan = 0 (tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Kemiskinan di Kabupaten Batu Bara)

H_a : DAK \rightarrow Kemiskinan \neq 0 (ada hubungan yang signifikan antara Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Kemiskinan di Kabupaten Batu Bara)

2) Uji Statistik

$$t_h = \beta_1 / S_{\beta_1}$$

$$t_h = -4.674617 / 0.608933 = -7.676729$$

Dibandingkan dengan t.tabel sebagai berikut:

$$T \text{ table} = \pm t (\alpha/2, n-k-1)$$

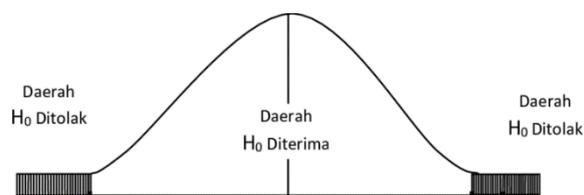
$$= \pm t (10\% / 2, 12 - 4 - 1)$$

$$= \pm t (5\%, 7)$$

$$= \pm 2.3646$$

3) Kriteria uji

Pada variabel ini menggunakan menggunakan nilai α 5% memiliki nilai *t-statistic* -7.676729 dengan nilai t-tabel 2.3646. hal ini membuktikan bahwa hipotesis H_0 ditolak dan artinya Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh dan signifikan terhadap Kemiskinan, dapat dilihat juga pada tabel distribusi berikut:



-7.676727 -2.3646 0 2.3646

Gambar 4.19 Kurva Distribusi Normal Uji t Variabel DAK

4) Kesimpulan

Dari hasil regresi menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan di Kabupaten Batu Bara. Karena semakin besar penerimaan Dana Alokasi Khusus maka akan mengurangi angka Kemiskinan.

1) Hipotesis

Ho: DBH \rightarrow Kemiskinan = 0 (tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Kemiskinan di Kabupaten Batu Bara)

Ha: DBH \rightarrow Kemiskinan \neq 0 (ada hubungan yang signifikan antara Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Kemiskinan di Kabupaten Batu Bara)

2) Uji Statistik

$$t_h = \beta_1 / S_{\beta_1}$$

$$t_h = 0.360428 / 0.549456 = 0,655927$$

Dibandingkan dengan t.tabel sebagai berikut:

$$T \text{ table} = \pm t (\alpha/2, n-k-1)$$

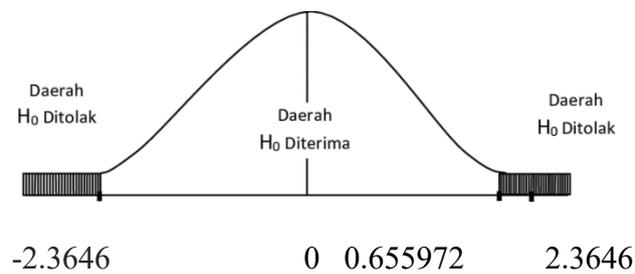
$$= \pm t (10\% / 2, 12 - 4 - 1)$$

$$= \pm t (5\%, 7)$$

$$= \pm 2.3646$$

3) Kriteria Uji

Pada variabel ini menggunakan menggunakan nilai α 5% memiliki nilai *t-statistic* 0.655972 dengan nilai t-tabel 2.3464. hal ini membuktikan bahwa hipotesis H_0 terima dan artinya Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan, dapat dilihat juga pada tabel distribusi berikut:



Gambar 4.20 Kurva Distribusi Normal Uji t Variabel DBH

4) Kesimpulan

Dari hasil regresi menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Batu Bara. artinya apabila dana bagi hasil menurun maka kemiskinan akan meningkat.

1) Hipotesis

Ho: PDRBKAP \rightarrow Kemiskinan = 0 (tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Produk Domestik Regional Bruto perkapita (PDRBKAP) terhadap Kemiskinan di Kabupaten Batu Bara)

Ha: PDRBKAP \rightarrow Kemiskinan \neq 0 (ada hubungan yang signifikan antara Produk Domestik Regional Bruto perkapita (PDRBKAP) terhadap Kemiskinan di Kabupaten Batu Bara)

2) Uji Statistik

$$t_h = \beta_1 / S_{\beta_1}$$

$$t_h = -2.533945 / 0.704441 = -3.597099$$

Dibandingkan dengan t.tabel sebagai berikut:

$$T \text{ table} = \pm t (\alpha/2, n-k-1)$$

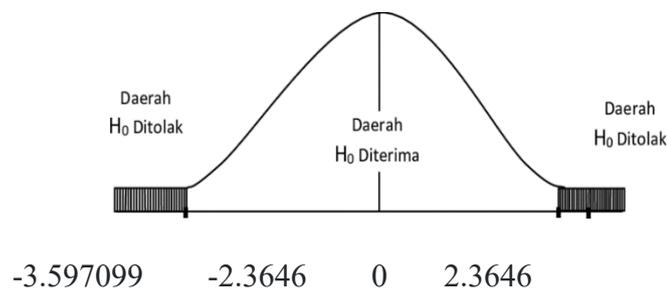
$$= \pm t (10\% / 2, 12 - 4 - 1)$$

$$= \pm t (5\%, 7)$$

$$= \pm 2.3646$$

3) Kriteria Uji

Pada variabel ini menggunakan menggunakan nilai α 5% memiliki nilai *t-statistic* -3.597099 dengan nilai t-tabel 2.3646. hal ini membuktikan bahwa hipotesis H_0 ditolak dan artinya Produk Domestik Regional Bruto perkapita (PDRBKAP)) berpengaruh dan signifikan terhadap Kemiskinan, dapat dilihat juga pada tabel distribusi berikut:



Gambar 4.20 Kurva Distribusi Normal Uji t Variabel PDRBKAP

4) Kesimpulan

Dari hasil regresi menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto perkapita (PDRBKAP) berpengaruh terhadap Kemiskinan di Kabupaten Batu Bara. apabila PDRB per kapita meningkat maka penduduk miskin di Kabupaten batu Bara akan menurun atau semakin sejahtera.

3. Uji F (simultan)

1) Hipotesis

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ (Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Produk Domestik Regional Bruto perkapita (PDRBKAP) Tidak Pengaruh Terhadap kemiskinan di Kabupaten Batu Bara)

$H_a : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ (Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Produk Domestik Regional Bruto perkapita (PDRBKAP) ada Pengaruh Terhadap kemiskinan di Kabupaten Batu Bara)

2) Uji Statistik, digunakan Uji F

$$F = \frac{R^2/K-1}{(1-R^2)/(n-k)}$$

$$F = \frac{0.959806^2/5-1}{(1-0.959806^2)/(12-1)}$$

$$F = 12.11890$$

Dibandingkan dengan F.tabel sebagai berikut ;

$$F. \text{ table} = (\alpha/2, n-1)$$

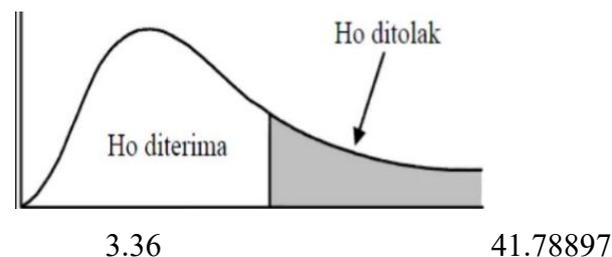
$$F (10\% / 2, 12-1)$$

$$F = (5\%, 11)$$

$$= 3.36$$

3) Kriteria Uji

Dapat dilihat juga melalui distribusi kurva f dengan nilai f tabel sebesar 3.36 sebagai berikut:



Gambar 4.21 Kurva Distribusi Uji F Pada Model Regresi

4) Kesimpulan

Dengan demikian maka H_0 ditolak yang artinya bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan produk domestik regional bruto perkapita (PDRBKAP) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kemiskinan.

4. Koefisien Determinasi (R^2)

Diketahui nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.936838 maka disimpulkan bahwa sumbangan Variabel Independen atau Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Produk Domestik Regional Bruto perkapita (PDRBKAP) secara simultan atau bersamaan sebesar 93,68%, sedangkan sisanya sebesar 6,32% di pengaruhi Variabel diluar penelitian ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten batu Bara Tahun 2018 sampai 2022 rata-rata mengalami penurunan sebesar 1,04%. Ini menunjukkan adanya perkembangan yang baik terhadap Kemiskinan di Kabupaten Batu Bara. namun ketika di Tahun 2021 mengalami kenaikan itu dikarenakan adanya virus covid 19 yang melanda dunia. Setelah usai covid 19 di tahun 2022 Kemiskinan di Kabupaten Batu Bara kembali mengalami penurunan sebesar 0,8% dari tahun 2021.
2. Hasil estimasi model yaitu pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRBKAP) terdapat 3 pengaruh yang signifikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Batu bara yaitu Variabel Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Produk Domestik Rgional Bruto Perkapita (PDRBKAP), sedangkan 1 variabel yang tidak signifikan itu ialah Dana Bagi Hasil (DBH). Dan dua variabel dihilangkan yaitu variabel Dana Desa (DD) dan Tingkat Partisipasi Angkatan kerja dikarenakan tidak lolos uji asuksi klasik yaitu terjadi heterokedastitas dan autokorelasi.

5.2 Saran

1. pemerintah Kabupaten Batu Bara diharapkan dapat memberikan akses jaringan seluas mungkin terutama keterlibatan komunitas lokal untuk pemberdayaan masyarakat miskin dengan berbagai upaya partisipatif terhadap pelaku program yaitu masyarakat umum. Tetapi hal ini harus mendapat pengawasan dari pihak terkait yaitu penyelenggara program pemberdayaan dan stakeholders yang menangani bidang pemberdayaan agar kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan harapan.

2. Selain pemerintah yang memiliki cara untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat, masyarakat itu sendiri harus memiliki cara sendiri untuk memadukan antara program pemerintah dan program dari mereka sendiri. Sehubungan dengan itu, cara masyarakat tersebut dapat dipertimbangkan untuk menjadi pengambil kebijakan dalam hal pengentasan kemiskinan dengan program pemberdayaan. Membangun kerjasama antara *stakeholder* dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal dengan membentuk suatu organisasi/lembaga yang akan memberikan harapan bagi orang-orang miskin dan secara efektif mempromosikan solidaritas dan perasaan indentitas kelompok yang sama dengan kelompok masyarakat yang lebih luas untuk menanggulangi budaya miskin, mengubah pola pikir masyarakat miskin menjadi maju yang dapat membuka diri dengan kepentingan sosial, ekonomi, maupun kegiatan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistika (BPS) 2022. *Persentase Kemiskinan Indonesia 2022*.
Jakarta: BPS www.bps.go.id
- Badan Pusat Statistika (BPS) 2022. *Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Batu
Bara Tahun 2018 - 2022*. Sumut: BPS www.bps.go.id
- Badan Pusat Statistika (BPS) 2022. *Harga Konstan Kabupaten Batu bara Tahun
2018 - 2022*. Sumut: BPS www.bps.go.id
- Badan Pusat Statistika (BPS) 2022. *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kabupaten Batu Bara Tahun 2018 - 2022*. Sumut: BPS
www.bps.go.id
- Badan Pusat Statistika (BPS) 2022. *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten
Batu Bara Tahun 2018-2022*. Sumut: BPS www.bps.go.id
- Dewi, D. C. N. T. (2022). *Analisis Faktor-Faktor Pembentuk Kemiskinan Pulau
Jawa Periode 2013-2021*. Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi
dan Studi Pembangunan, 22(1), 132-145..
- Firdausy, C. M. (2015). *Konsep dan garis kemiskinan Ecopos*.
- Gujarati, Damodar N dan Dawn C. Porter. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika*.
Jakarta: Salemba Empat.
- Gujarati, D. (2013). *Ekonometrika Dasar*. Jakarta : Erlangga
- Hasibuan, L. S. (2016). Analisis Pola Pengeluaran Rumah tangga Miskin di
Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekonomikawan*, 16(1), 78382.

Jhingan, M. (2010). *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kadji, Y. (2012). *Kemiskinan dan Konsep teoritisnya*. Guru Besar Kebijakan Publik Fakultas Ekonmi Dan Bisnis UNG, 1-7.

Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Dasar-Dasar Ekonomi Pembangunan*. Edisi Ke-lima. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Ksatria, I., Istiqomah, A., & Arintoko, A. (2022). *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Sektoral Terhadap Kemiskinan di Indonesia*. Muhammadiyah University North Sumatra

Saputra, I. S., Zulfanetti, Z., & Edi, J. K. (2019). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Jambi*. e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, 8(2), 68-81.

Setiawati, I. (2017). *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendidikan Dan Tenaga Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Pinrang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)*.

Todaroo, 2006. *Pembangunan Ekonomi* . Edisi 7. Penerbit Erlangga, Jakarta

World Bank. 2006. *Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*

LAMPIRAN

Data Kemiskinan, Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak), Daba Bagi Hasil (Dbh), Dana Desa (Dd), Produk Domestik Regional Bruto Kapita Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Tpak)

Tahun	Kemiskinan	DAU	DAK	DBH	DD	PDRB kap	TPAK
2017	12.48%	602,464,355,000	155,854,156,870	23,679,312,410	113,380,000,000	72,738,987.00	66.07%
2018	12.57%	602,464,355,000	151,358,139,644	31,051,731,219	104,583,228,000	77,415,555.00	69.47%
2019	12.14%	628,895,139,000	144,562,197,837	26,811,215,335	118,843,171,000	81,396,934.00	64.89%
2020	11.88%	637,787,457,000	168,199,099,000	24,073,570,000	121,634,028,000	85,362,153.00	69.10%
2021	12.38%	573,892,742,000	156,951,481,000	24,603,573,000	121,071,737,000	90,029,827.00	70.00%
2022	11.53%	555,512,477,000	232,657,117,000	29,551,156,000	117,193,572,000	98,150,709.02	73.50%

Data Yang Telah Di Interpolasi Menjadi Semi Annual Dan Di Logaritmankan

KEMISKINAN	DAU	DAK	DBH	DD	PDRBKAP	TPAK
14.03001692	14.81355	14.76242	14.68126	14.75161	14.40802	11.07248
14.04403958	14.81316	14.76202	14.69131	14.74798	14.40991	11.12173
14.04761385	14.81316	14.76145	14.69694	14.74639	14.41163	11.14367
14.04085169	14.81355	14.76072	14.69822	14.74685	14.41318	11.14005
14.01651074	14.81467	14.75879	14.69281	14.75091	14.41449	11.08214
14.00230128	14.8152	14.75981	14.69016	14.75239	14.41583	11.08214
13.98525333	14.81587	14.76478	14.68744	14.75246	14.41708	11.13276
13.99030385	14.81503	14.76557	14.68654	14.75265	14.41846	11.15088
14.03253543	14.8122	14.76092	14.68683	14.75256	14.41973	11.14728
14.02546755	14.81092	14.76407	14.68897	14.75219	14.42163	11.16514
13.9904088	14.81032	14.77166	14.69279	14.75155	14.42399	11.16514
13.92425285	14.8104	14.7836	14.69826	14.75064	14.42678	11.23156